

**LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2026**

**DISBUDPAR
KABUPATEN TAPIN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Petunjuk-Nya kami dapat menyusun **Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2026**.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen tahunan yang memuat perencanaan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2026 terdiri dari gambaran umum, tugas pokok, serta tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin selama 1 tahun.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2026 ini masih terdapat kekurangan baik dari penyajian data maupun paparan isi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya penyusunan RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.

Rantau, 03 Juli 2025

Kepala Dinas,



Drs. Hamdan Rosyadie, M.Si
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19700119 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
a. Latar Belakang	I-1
b. Landasan Hukum	I-2
c. Maksud dan Tujuan	I-5
d. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disbudpar Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	II-2
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan SKPD	II-3
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-3
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi	III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Disbudpar Kabupaten Tapin	III-7
3.3. Program dan Kegiatan	III-8
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	IV-1
4.1 . Rencana Kerja dan Pendanaan	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V

DAFTAR TABEL

Tabel T-II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Kabupaten Tapin
Tabel T-II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Disbudpar Kabupaten Tapin
Tabel T-II.3	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Tapin.....
Tabel T-II.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel T-III.1	Tujuan dan Sasaran SKPD Disbudpar Kabupaten Tapin
Tabel T-IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Disbudpar Tahun 2026 Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Kabupaten Tapin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah RKPD, baik kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin sebagai unit kerja perencanaan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi untuk urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus didukung dengan aparatur yang memadai

baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, maka disusunlah Renja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2026 SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;
6. Undang-Undang yang mengatur tentang kebudayaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04)
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022 – 2025.
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09)

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09)
27. Perda Nomor 3 Tahun 2025 Lembaran Daerah Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142 Tanggal 14 Agustus 2025 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03) Tanggal 20 Agustus 2025.
29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
30. Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2025-2029 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 31) Tanggal 19 September 2025.
31. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 25) Tanggal 01 Agustus 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin adalah untuk:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin tahun 2026 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di sektor Kebudayaan dan Pariwisata selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di sektor budaya dan pariwisata serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan RPJMD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disbudpar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2024 hasil capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yaitu dengan serapan anggaran sebesar **86,77%** dan capaian kinerja **93,13%**. Berbagai penyebab kendala dan pencapaian target indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin merupakan gambaran dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Berikut evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin tahun 2024 yang telah dilakukan pada berbagai program dan kegiatan :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan SKPD meliputi Renja, Renstra, IKU, Penetapan Kinerja, LKIP, LKPJ dan LKPD serta Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per triwulan SKPD dengan

alokasi dana sebesar Rp. 12.353.800,- dana terserap sebesar Rp.11.540.450,- atau 93,42% dengan capaian kinerja 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan ASN, meningkatkan kesejahteraan ASN dan meningkatkan disiplin dan kinerjanya dan dapat memberikan kualitas layanan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan, dana yang terserap Rp 3.216.534.808,- dari Rp. 3.441.992.062,- jumlah anggaran dengan persentase realisasi sebesar 93,45% dan capaian kinerja 100%

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD pertengahan tahun dan laporan keuangan SKPD akhir tahun dana yang terserap Rp 3.813.650,- dari Rp. 4.145.400,- atau terserap sebesar 92,00% dan capaian kinerja 100%

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan keuangan SKPD pertengahan tahun dan laporan keuangan SKPD semesteran dana yang terserap Rp 3.645.500,- dari

Rp. 4.145.400,- atau terserap sebesar 87,96% dan capaian kinerja 100%

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Disbudpar. Dana yang disediakan sebesar Rp. 6.440.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.495.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 3.945.800,- atau serapan sebesar 38,74% dengan capaian kinerja 100%

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor disediakan untuk membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam bidang ketata usahaan kantor dengan serapan dana sebesar Rp. 35.957.927,- dari dana yang disediakan sebesar Rp. 71.745.600,- atau serapan sebesar 50,12% dengan capaian kinerja 100%

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini disediakan untuk membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam penyediaan logistik dengan serapan dana sebesar Rp. 146.989.000,- dari dana yang disediakan sebesar Rp. 158.897.500,- atau serapan sebesar 92,51% dengan capaian kinerja 100%.

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan cetak dan penggandaan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar, dana yang terserap 72,24% dari anggaran sebesar Rp. 20.056.800,- terealisasi Rp.14.489.400,- dengan capaian kinerja 100%

e. Penyediaan Bahan/Material

Untuk memenuhi kebutuhan renovasi kantor dan sebagainya, di dapatkan anggaran sebesar Rp. 14.454.400,- dengan belum ada realisasi anggaran yakni sebesar 0%.

f. Fasilitas Kunjungan Tamu

Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu ini disediakan untuk bahan mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam memberikan pelayanan tamu yang datang ke Disbudpar, dana yang terserap 100% dari anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- dengan capaian kinerja 100%

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, baik di dalam maupun di luar daerah dana yang disediakan sebesar Rp. 1.802.268.000,- dan terserap sebesar Rp. 1.774.099.708,- atau 98,44% dan capaian kinerja 100%

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam hal penyediaan atau pengadaan peralatan dan mesin, persentase dana yang terserap hanya sebesar 67,56% dari dana Rp. 120.057.900,- terserap sebesar Rp. 81.117.116,- hal ini dikarenakan tidak banyak fasilitas peralatan kantor yang mengalami kerusakan.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam hal penyediaan atau pengadaan peralatan dan mesin, persentase dana yang terserap hanya sebesar 85,40% dari dana Rp. 5.485.600,- terserap sebesar Rp. 4.684.685,- hal ini dikarenakan tidak banyak fasilitas peralatan kantor yang mengalami kerusakan.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Disbudpar. Dana yang disediakan sebesar Rp. 173.983.520,- dan terealisasi sebesar Rp.98.140.078,- sisa anggaran sebesar Rp.75.843.442,- diperoleh dari selisih pembayaran telpon,internet, air.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam melayani seluruh ASN. Dana yang disediakan sebesar Rp. 238.192.880,- dan terealisasi sebesar Rp.215.575.060,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 90,50%.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam bidang pemeliharaan, penyediaan bahan bakar dan pembayaran pajak kendaraan dinas, persentase dana yang terserap sebesar 60,56%, dari dana Rp 38.100.450,- terserap sebesar Rp 23.074.800,-, dengan capaian kinerja 100%.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam bidang pemeliharaan peralatan gedung kantor dan mesin lainnya, persentase dana yang terserap hanya sebesar 32,49% dari dana Rp. 14.590.115,- terserap sebesar Rp.4.740.000,-.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kenyamanan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya menyediakan dana sebesar Rp. 22.783.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.005.000,- atau sebesar 30,75%

II. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan pemajuan kebudayaan, agar cagar budaya yang dimiliki tetap terjaga dan tetap ada serta dimanfaatkan dari generasi ke generasi, dari dana yang tersedia Rp. 43.826.500,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 42.896.800,- atau sebesar 97,88%.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Kegiatan ini sebagai sarana pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan, dari dana yang tersedia Rp. 16.144.300,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 15.773.650,- atau sebesar 97,70%.

2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya

dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan Tradisi Budaya melalui para pemangku adat Dayak, dari dana yang tersedia Rp. 117.190.750,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp.65.170.700,- atau sebesar 55,61%.

- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan sumber daya manusia atau Lembaga dan pranata Tradisional agar tetap melestarikan dan menerapkan adat budaya pada kehidupan sehari-hari, dari dana yang tersedia Rp. 105.839.800,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 45.000.000,- atau sebesar 42,52%.

- c. Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan pada para seniman dan budayawan yang berprestasi dan memberikan kontribusi yang besar terhadap kelestarian dan perkembangan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Tapin, dari dana yang tersedia Rp. 43.303.760,- dari kegiatan

yang terserap sebesar Rp. 43.189.300,- atau sebesar 99,74%.

3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga adat

Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan lembaga adat melalui melalui para pemangku adat Dayak, dari dana yang tersedia Rp. 211.326.510,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 166.254.600,- atau sebesar 78,67%.

III. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang seni dan budaya melalui bimtek dan pelatihan kesenian tradisional. dari dana yang tersedia Rp. 356.851.600,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 145.877.404,- atau sebesar 40,88%.

b. Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

Kegiatan ini merupakan untuk memberikan standarisasi dan sertifikasi bagi SDM kesenian tradisional . dari dana yang tersedia Rp. 359.870.400,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp.278.526.000,- atau sebesar 77,40%.

c. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola bagi lembaga kesenian tradisional. dari dana yang tersedia Rp. 224.344.450,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 204.166.250,- atau sebesar 90,01%.

IV. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

a. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya

Kegiatan ini bertujuan untuk mendata objek yang diduga cagar budaya, kemudian melakukan penelitian dan mendaftarkan objek tersebut sehingga bisa ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten Tapin. dari dana yang tersedia Rp. 19.600.000,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 18.399.900,- atau sebesar 93,88%.

2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

a. Pelindungan Cagar Budaya

Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi cagar budaya, dalam hal ini Disbudpar memelihara Benda Cagar Budaya (BCB)/ situs melalui juru pelihara sehingga BCB/ Situs gtersebut tetap terjaga

kelestariannya, dari dana yang tersedia Rp. 186.420.200,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 186.418,- atau sebesar 100%.

V. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Dana yang tersedia pada kegiatan ini berada di angka Rp.583.757.922,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp.563.619.824,- atau sebesar 96,55%.

2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan infrastruktur kepariwisataan melalui pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam mengelola Destinasi pariwisata kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap para wisatawan yang datang, dari dana yang tersedia Rp. 3.102.800.470,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 2.574.637.000,- atau sebesar 82,98%.

VI. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,

Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.

Kegiatan ini bertujuan mempromosikan pariwisata Kabupaten Tapin melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, media social dan media lainnya agar dapat menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Tapin, dari dana yang tersedia Rp 178.465.650,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp 169.383.000,- atau sebesar 94,17%.

- b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk memasarkan Pariwisata Kabupaten Tapin agar dikenal dikancah Nasional maupun Internasional melalui berbagai kegiatan baik di dalam dan di luar negeri, dari dana yang tersedia Rp 919.907.268,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp 866.248.095,- atau sebesar 94,17%.

- c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Tapin dan menyebarkan informasi kepariwisataan tersebut melalui website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

maupun media social, dari dana yang tersedia Rp 70.000.000,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp 70.000.000 atau sebesar 100%.

d. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata baik di dalam dan luar negeri. dari dana yang tersedia Rp 190.561.000,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp 175.850.901,- atau sebesar 92,28%.

i. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

a. Penyusunan Dokumen Strategis bidang ekonomi kreatif daerah

dana yang tersedia dalam kegiatan ini adalah Rp 60.933.950 dan yang terserap sebesar Rp 55.500.600 atau sebesar 91,08%

ii. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- a. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif

Dana yang tersedia Rp 188.974.912,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp 170.424.000,- atau sebesar 90,18%.

- b. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Dana yang tersedia sebesar Rp. 106.697.300 dan yang terealisasi sebesar Rp. 105.583.000 dengan persentase realisasi sebesar 98,96%.

- c. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

Realisasi anggaran pada kegiatan ini mencapai 56,63% yakni sebesar Rp. 222.987.600 dari Rp. 393.745.330 jumlah anggaran.

2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- a. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha ekonomi kreatif, dari dana yang tersedia Rp 43.310.010,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp 33.761.400,- atau sebesar 77,95%.

Dari dana yang tersedia Rp 10.329.113.219,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp 8.571.684.683,- atau sebesar 82,99%.

Berikut ini adalah capaian kinerja yang menunjang tercapainya indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin :

Evaluasi Pelaksanaan Renja Disbudpar Tahun 2025 dan capaian Renstra Disbudpar bisa dilihat pada lampiran (table 2.1)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, seperti terlihat pada lampiran (Tabel 2.2)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan SKPD

Sektor kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin sudah dipandang sebagai sektor strategis yang mampu menopang pendapatan daerah dari sektor inti. Namun, sektor ini belum bertumbuh secara baik dan signifikan di Kabupaten Tapin. Namun daerah melihat sektor ini sebagai peluang emas. Dengan memperhatikan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam maupun butan sebagai daya tarik yang dapat dikembangkan secara optimal. Targetnya, kebudayaan dan pariwisata memiliki daya saing dengan mengedepankan aspek keberlanjutan. Dalam perjalanannya, pengembangan kebudayaan dan pariwisata menemui sejumlah kendala yang apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan pemecahan masalahnya dikhawatirkan akan berdampak pada sejumlah sektor lainnya, seperti kesejahteraan sosial, kerusakan lingkungan, tergerusnya identitas budaya, pembangunan infrastruktur tidak merata dan lain sebagainya.

Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang secara sistematis, dengan jalan

melakukan identifikasi berbagai faktor dalam lingkungan internal maupun eksternal, isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Isu Strategis Bidang Kebudayaan

a. Rendahnya pelestarian budaya ;

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya

b. Kurangnya kerjasama antara pemerintah, lembaga kesenian, dan pemangku kesenian daerah;

Kurangnya kerjasama antara pemerintah, lembaga kesenian, dan pemangku kesenian daerah dalam mengembangkan dan melestarikan kesenian daerah sehingga kesenian daerah tidak terpromosikan dengan baik kepada masyarakat luas, Kesenian daerah tidak terlestarikan dengan baik karena kurangnya dukungan dan perhatian, Kesenian daerah tidak berkembang: Kesenian daerah tidak berkembang karena kurangnya inovasi dan kreativitas

c. Kurangnya kegiatan seni dan budaya;

Kurangnya kegiatan seni dan budaya yang menampilkan kekayaan seni dan budaya daerah, sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengalami dan menikmati kekayaan tersebut, hal ini membuat kurangnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah dan kurangnya kesempatan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah.

d. Rendahnya Penetapan Cagar Budaya

Rendahnya perlindungan terhadap situs, bangunan, dan objek budaya yang bernilai sejarah dan budaya daerah sehingga membuat kerusakan dan kehancuran situs, bangunan, dan objek budaya yang tidak terlindungi.

2. Isu Strategis Bidang Pariwisata

a. Terbatasnya amenities, aksesibilitas dan atraksi di destinasi wisata

Jika suatu destinasi memiliki keterbatasan dalam hal amenities maka akan membuat wisatawan kurang nyaman, jika aksesibilitas terbatas maka akan membuat wisatawan sulit datang dan apabila destinasi kurang atraksi maka kurang menarik minat wisatawan dengan kata lain membuat wisatawan cepat bosan. Hal ini akan membuat destinasi kompetitif dan akan sulit berkembang dalam industri pariwisata. Untuk mengatasi ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta untuk meningkatkan ketiganya secara berkelanjutan

b. Terbatasnya Pemasaran Pariwisata

Tanpa Pemasaran yang kuat maka destinasi wisata yang baguspun bisa sepi pengunjung. Terbatasnya pemasaran Pariwisata menghambat pertumbuhan sektor wisata, meskipun potensi alam, budaya dan atraksinya tinggi. Untuk mengatasi ini diperlukan branding destinasi, pemanfaatan media social dan website resmi, bekerjasama dengan influencer dan travel blogger, penyediaan video, photo, ulasan, google maps dan lain-lain

c. Rendahnya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata

Tanpa kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan pariwisata akan terhambat dan hasilnya tidak berkelanjutan. Sinergi ketiga pihak sangat penting agar wisata berkembang dengan manfaat yang adil dan merata. Untuk mengatasinya diperlukan membentuk forum koordinasi pariwisata daerah (melibatkan tiga pihak) Mengadakan pelatihan dan pemberdayaan Masyarakat Mendorong investasi swasta yang inklusif (bermanfaat untuk lokal) Pemerintah membuat kebijakan

yang mendorong kolaborasi, bukan jalan sendiri Mengembangkan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism)

d. Kualitas pelayanan terhadap wisatawan yang tidak maksimal

Pelayanan wisata adalah segala bentuk layanan yang diterima wisatawan selama perjalanan, mulai dari sambutan, informasi, keamanan, keramahan, fasilitas, hingga bantuan saat dibutuhkan. Kualitas pelayanan yang tidak maksimal artinya wisatawan merasa tidak puas karena pelayanan lambat, tidak ramah, atau tidak profesional, informasi wisata tidak jelas atau sulit diakses, fasilitas umum kurang bersih atau tidak layak, pemandu wisata tidak kompeten, kurangnya kemampuan komunikasi (misalnya bahasa asing), untuk mengatasi hal ini diperlukan, Pelatihan SDM Pariwisata, Peningkatan Sarana & Prasarana Peningkatan Kemampuan Bahasa Asing, Mendorong Budaya Sapta Pesona.

e. Minimnya pelaku usaha ekonomi kreatif disekitar destinasi wisata

Ekonomi kreatif di sektor pariwisata mencakup usaha berbasis ide dan kreativitas yang memberikan nilai tambah pada pengalaman wisatawan. Contohnya kerajinan tangan, kuliner khas, produk fashion lokal, jasa fotografi, pertunjukan seni. Minimnya pelaku usaha ekonomi kreatif berarti masih sedikit masyarakat atau UMKM yang menyediakan produk/layanan kreatif khas lokal, menjual souvenir atau makanan khas, mengembangkan bisnis berbasis seni, budaya, dan inovasi. Untuk mengatasi hal ini diperlukan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dukungan Modal dan Akses Pasar, Kolaborasi dengan Seniman Lokal, Penciptaan Ruang Kreatif, Digitalisasi Produk Lokal

Adapun capaian kinerja yang telah dicapai Disbudpar Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Utama / Esselon II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	25	25,61 %	102,44	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (jam)	4 Jam 45 Menit	4 jam 58 menit	100	Sangat Tinggi	Kajian Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Disbudpar)
		Rata-Rata Belanja Wisatawan (rupiah)	Rp 600.000	Rp600.000	100	Sangat Tinggi	Kajian Rata-Rata Belanja Wisatawan (Disbudpar)
2	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan (%)	18,75	27,27	145,44	Sangat Tinggi	Disbudpar
		persentase cagar budaya yang tetapkan (%)	10	7,14	71,4	Sedang	Disbudpar
3	Meningkatnya capaian LAKIP/LKjIP	Nilai SAKIP Disbudpar (score)	74	78,95	106,68	Sangat Tinggi	Inspektorat Kabupaten Tapin
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Disbudpar (Point)	30	73,81	246,03	Sangat Tinggi	Aplikasi MyASN

Capaian Kinerja Esselon III dan IV

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Esselon III							

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP	75	78,95	106,68	Sangat Tinggi	Sekretariat
2	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Sangat Tinggi	Sekretariat
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90	90	100	Sangat Tinggi	Sekretariat
4	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (score)	4,3	4,19	97,44	Sangat Tinggi	Sekretariat
5	Meningkatnya pemanfaatan seni budaya	persentase seni budaya yang dimanfaatkan	50	47,5	95	Sangat Tinggi	Bidang Kesenian
		persentase budaya yang dimanfaatkan	14,5	17,4	100	Sangat Tinggi	Bidang Kesenian
6	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kelembagaan seni budaya	persentase kelembagaan seni budaya yang dibina	50	17,5	35	Sangat Rendah	Bidang Kesenian
		persentase kelembagaan seni budaya yang dikembangkan	15	10	67	Sedang	Bidang Kesenian
7	Meningkatnya perlindungan cagar budaya dan warisan	persentase cagar budaya yang dilindungi	19	21,2	100	Sangat Tinggi	Bidang Kebudayaan

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	budaya takbenda						
		persentase warisan budaya takbenda yang dilindungi	16,6	16,9	100	Sangat Tinggi	Bidang Kebudayaa n
8	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	persentase destinasi yang dikelola dengan baik	19,6	5	26	Sangat Rendah	Bidang Pengemban gan Potensi Pariwisata dan Ekokraf
9	Meningkatnya Perluasan pemasaran Pariwisata daerah	Persentase kerjasama untuk pemasaran pariwisata daerah sesuai yang ditargetkan	30	50	100	Sangat Tinggi	Bidang Pemasaran
10	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan usaha industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan pelaku Ekonomi Kreatif	5	-13	-260	Sangat Rendah	Bidang Pengemban gan Potensi Pariwisata dan Ekokraf
11	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan pelaku Ekonomi Kreatif	5	-13	-260	Sangat Rendah	
		Persentase Peningkatan pelaku usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	25	79	100	Sangat Tinggi	

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Esselon IV							
1	Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100	100	100	Sangat Tinggi	Subbag Program dan Pelaporan
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100	100	100	Sangat Tinggi	Subbag Program dan Pelaporan
2	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100	100	100	Sangat Tinggi	Subbag Keuangan
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100	100	100	Sangat Tinggi	Subbag Keuangan
3	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100	100	100	Sangat Tinggi	Subbag Umum dan Kepegawaian
4	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD)	90	100	100	Sangat Tinggi	Subbag Umum dan Kepegawaian

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Daerah (BMD)	dalam kondisi baik					n
5	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100	100	100	Sangat Tinggi	Subbag Umum dan Kepegawaian
6	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	90	100	100	Sangat Tinggi	Subbag Umum dan Kepegawaian
7	Meningkatnya event adat budaya	persentase event adat budaya yang terlaksana pada Calendar of Events	100	100	100	Sangat Tinggi	JF. Pamong Budaya
8	Terlaksananya event adat budaya	persentase event adat budaya yang masuk CoE	76	71,4	94	Sangat Tinggi	JF. Pamong Budaya
9	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kelembagaan seni budaya	persentase kelembagaan seni budaya yang dibina	30	10	33	Sangat Rendah	
10	Tersedianya wadah untuk mengapresiasi pelaku seni budaya	persentase sanggar seni budaya yang sesuai standar	10	17,5	100	Sangat Tinggi	JF. Pamong Budaya
11	Terlaksananya pelatihan seni budaya pada sanggar seni budaya	persentase sanggar seni budaya yang mendapatkan pelatihan	50	80	100	Sangat Tinggi	JF. Pamong Budaya

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Terlaksananya Bimtek Seni Budaya	Persentase SDM pelaku seni budaya yang mengikuti Bimtek bersertifikat	30	18,10	60	Rendah	JF. Pamong Budaya
13	Meningkatnya SDM pelaku seni budaya	persentase peningkatan SDM pelaku seni budaya yang terampil	30	25,20	84	Tinggi	JF. Pamong Budaya
14	Terlaksananya pengusulan karya budaya sebagai warisan budaya tak benda	Persentase karya budaya yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda	16	18,18	100	Sangat Tinggi	JF. Pamong Budaya
15	Persentase karya budaya yang terdata dalam database DAPOBUD sebagai warisan budaya tak benda	Persentase karya budaya yang terdata dalam database DAPOBUD sebagai warisan budaya tak benda	20	16,90	85	Tinggi	JF. Pamong Budaya
16	Meningkatnya event seni budaya	persentase event seni budaya yang terlaksana pada Calendar of Events Daerah	75	50	67	Sedang	JF. Pamong Budaya
17	Terlaksananya partisipasi event seni budaya di luar daerah	Persentase event seni budaya yang diikuti sesuai Kalender Event Luar	30	20	67	Sedang	JF. Pamong Budaya

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Daerah					
18	Terlaksananya Pementasan seni budaya	persentase sanggar seni budaya yang tampil sesuai kriteria	50	45	90	Tinggi	JF. Pamong Budaya
19	Terlaksananya pendaftaran objek diduga cagar budaya	persentase peningkatan cagar budaya yang didaftarkan	36	16	44	Sangat Rendah	JF. Pamong Budaya
20	Terlaksananya pengelolaan cagar budaya	persentase cagar budaya yang dipelihara sesuai dengan aslinya	96,3	96,3	100	Sangat Tinggi	JF. Pamong Budaya
21	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Persentase Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang terealisasi	5	3,4	68	Sedang	JF. Adyatama Kepariwisata an dan Ekonomi Kreatif
		Persentase Master Plan yang menjadi DED	14,2	21,4	100	Sangat Tinggi	JF. Adyatama Kepariwisata an dan Ekonomi Kreatif
22	Meningkatnya Amenitas (Sarana dan Prasarana) pada destinasi wisata	persentase sarana dan prasarana yang tersedia pada destinasi wisata	8,3	3,4	41	Sangat Rendah	JF. Adyatama Kepariwisata an dan Ekonomi Kreatif
23	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi	Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang	8,3	2,08	25	Sangat Rendah	JF. Adyatama Kepariwisata an dan Ekonomi

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Wisata	terpelihara					Kreatif
24	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Dan Daya Tarik Wisata yang dipromosikan melalui sosial media	25	82	100	Sangat Tinggi	JF. Adyatama Kepariwisatan dan Ekonomi Kreatif
		Persentase event yang diikuti	25	85	100	Sangat Tinggi	JF. Adyatama Kepariwisatan dan Ekonomi Kreatif
		Persentase kalender of event yang terlaksana	60	89	100	Sangat Tinggi	JF. Adyatama Kepariwisatan dan Ekonomi Kreatif
		Persentase data dan informasi pariwisata yang berkualitas	70	80	100	Sangat Tinggi	JF. Adyatama Kepariwisatan dan Ekonomi Kreatif
		Persentase Konten promosi Destinasi dan Daya tarik wisata yang dipublikasikan	25	82	100	Sangat Tinggi	JF. Adyatama Kepariwisatan dan Ekonomi Kreatif
		Jumlah Event yang memenuhi standart event kabupaten	63	89	100	Sangat Tinggi	JF. Adyatama Kepariwisatan dan Ekonomi Kreatif
25	Terlaksananya Kualitas SDM	Persentase pelaku	9,80	8,1	83	Tinggi	

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ekonomi kreatif yang terdata					
26	Meningkatnya Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	8,70	4,9	56	Rendah	JF. Adyatama Kepariwisat aan dan Ekonomi Kreatif
27	Terlaksananya pembinaan pelaku usaha pariwisata	persentase pelaku usaha pariwisata yang terbina	25,00	25	100	Sangat Tinggi	JF. Adyatama Kepariwisat aan dan Ekonomi Kreatif
28	Terlaksananya Bimtek Pelaku Usaha Pariwisata	Persentase pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan bimbingan teknis bersertifikat	20,00	20	100	Sangat Tinggi	JF. Adyatama Kepariwisat aan dan Ekonomi Kreatif
29	Meningkatnya Event Pariwisata	Persentase Pokdarwis yang dibina	79,00	100	100	Sangat Tinggi	JF. Adyatama Kepariwisat aan dan Ekonomi Kreatif
30	Terlaksananya Bimbingan teknis pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bimbingan teknis bersertifikat	3,60	3	83	Tinggi	JF. Adyatama Kepariwisat aan dan Ekonomi Kreatif

Tingkat Kunjungan Wisatawan tahun 2018-2023

Tahun	Realisasi Jumlah Kunjungan	Naik/Turun Dibandingkan Kinerja Tahun Sebelumnya	Kenaikan/ Penurunan
Tahun 2020	827.012	-	-
Tahun 2021	1.035.568	naik	25,22%
Tahun 2022	1.727.409	naik	66,80%
Tahun 2023	2.505.020	naik	45,48%
Tahun 2024	3.156.802	naik	25,61%

Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan pada tahun 2024 sebanyak 2 objek diantaranya adalah sebagai berikut

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Nomor Register	Surat Keputusan
1	Mesjid Al-Mukarramah Banua Halat Kiri	Desa Banua Halat, Kec.Tapin Utara	Bangunan Cagar Budaya	SK Bupati Tapin nomor 100.3.3.2/626 /kum/2024	Bupati Tapin
2	Tiang Batung	Desa Batung, Kec. Piani	Benda Cagar Budaya	SK Bupati Tapin nomor 100.3.3.2/903 /kum/2024	Bupati Tapin

Sedangkan Jumlah Cagar Budaya yang terdata sebanyak 28 objek adalah sebagai berikut :

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Nomor Register	Surat Keputusan
1	Makam Guru	Desa	Bangunan	100.3.3/021/SE	Kadisbudpar

	Minin	Binderang, Kec.Lokpaikat	Cagar Budaya	KRT/BUDPAR/I /2024	
2	Makam Nursitiwana	Desa Pabaungan, Kec.Candi Laras Selatan	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I /2024	Kadisbudpar
3	Makam Pahlawan (Pambalah Batung)	Desa Margasari Ulu, Kec.Candi Laras Selatan	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I /2024	Kadisbudpar
4	Makam Datu Dulung	Desa Tatakan, Kec.Tapin Selatan	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I /2024	Kadisbudpar
5	Makam Datu Muning	Desa Sei. Rutas, Kec.Candi Laras Selatan	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I /2024	Kadisbudpar
6	Makam KH. Abdul Karim	Desa Banua Halat Kiri, Kec.Tapin Utara	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I /2024	Kadisbudpar
7	Makam Datu Batalas H. Muhammad	Desa Batalas, Kec.Candi Laras Utara	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I /2024	Kadisbudpar
8	Makam H.Muhammad Sa'ad	Desa Kesumagiri, Kec.Tapin Utara	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I /2024	Kadisbudpar
9	Makam Datu Nuraya	Desa Tatakan, Kec.Tapin Selatan	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I /2024	Kadisbudpar
10	Makam Syech Salman Al-Farisi	Desa Gadung, Kec.Bakaranga n	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I /2024	Kadisbudpar
11	Makam Datu Suban	Desa Tandui Tatakan, Kec.Tapin Selatan	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I /2024	Kadisbudpar
12	Makam Datu Sanggul	Desa Tatakan, Kec.Tapin Selatan	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I /2024	Kadisbudpar
13	Makam Pahlawan (Tasan Panyi)	Jl. Pahlawan, Kel. Rantau Kanan, Kec.Tapin Utara	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I /2024	Kadisbudpar
14	Mesjid Al-Mukarramah Banua Halat Kiri	Desa Banua Halat, Kec.Tapin Utara	Bangunan Cagar Budaya	1. SK Menteri KM.7/PW. 007/MK/0 3/2004 2. SK Bupati Tapin nomor 100.3.3.2/ 626/kum/ 2024	1. Menteri Kebudayaan 2. Bupati Tapin
15	Mesjid Annor	Desa Parigi, Kec.Bakaranga n	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I /2024	Kadisbudpar

16	Mesjid Baiturrahman	Desa PK Hilir, Kec.Tapin Tengah	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I/2024	Kadisbudpar
17	Mesjid Al-Istiqomah	Desa Gadung, Kec.Bakarangan	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I/2024	Kadisbudpar
18	Mesjid Tua Margasari (Baiturrahman)	Desa Margasari Ulu, Kec.Candi Laras Selatan	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I/2024	Kadisbudpar
19	Makam Syarifah Aminah	Kelurahan Binuang, Kec. Binuang	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I/2024	Kadisbudpar
20	Makam Datu Kabul	Desa Baulin, Kec. Candi Laras Utara	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I/2024	Kadisbudpar
21	Candi Laras	Desa Candi Laras, Kec.Candi Laras Selatan	Situs Cagar Budaya	SK Menteri no	Menteri Kebudayaan
22	Makam Datu Anggut (H. M Shaleh Bin Aisyah)	Desa Baringin A, Kec. Candi Laras Selatan	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I/2024	Kadisbudpar
23	Makam Datu Aling	Desa Lawahan, Kec. Tapin Selatan	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I/2024	Kadisbudpar
24	Makam Datu Ganun	Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I/2024	Kadisbudpar
25	Makam Assyarif Syech Muhdar bin Abdurrahman Azmatkhan	Kelurahan Rangda Malingkung, Kec.Tapin Utara	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I/2024	Kadisbudpar
26	Makam Datu Tambal	Desa Tungkap, Kec.Binuang	Bangunan Cagar Budaya	100.3.3/021/SE KRT/BUDPAR/I/2024	Kadisbudpar
27	Masjid Asyura	Masjid Asyura terletak di Desa Tirik, Kecamatan Tapin Tengah	Bangunan Cagar Budaya	-	-
28	Tiang Batung	Desa Batung, Kec. Piani	Benda Cagar Budaya	SK Bupati Tapin nomor 100.3.3.2/903/kum/2024	Bupati Tapin

Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan ada 9 objek sebagai berikut

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Tanggal Penetapan Sebagai WBTB RI
1		Tanggal 20 Oktober 2015 ditetapkan oleh

	Baayun Maulid	Kemendikbud RI
2	Kurung-Kurung	Tanggal 9 Oktober 2019 ditetapkan oleh Kemendikbud RI
3	Bagandut	Tanggal Desember 2020 ditetapkan oleh Kemendikbud RI
4	Baayun Maulid	Tanggal 20 Oktober 2015 ditetapkan oleh Kemendikbud RI
5	Ladon	Tanggal 21 Oktober 2022 ditetapkan oleh Kemendikbud RI
6	Bapandung	Tanggal 25 Oktober 2023 ditetapkan oleh Kemendikbud RI
7	Kalangkang Mantit	Tanggal 16 November 2024 ditetapkan oleh Kemendikbud RI
8	Kalayangan Dandang	Tanggal 16 November 2024 ditetapkan oleh Kemendikbud RI
9	Wayang Topeng Carita	Tanggal 16 November 2024 ditetapkan oleh Kemendikbud RI

Sedangkan objek pemajuan kebudayaan yang terdata dan masih dimanfaatkan ada 33 adalah sebagai berikut :

No.	Objek Pemajuan Kebudayaan	Uraian
1	Kalangkang Mantit	Kalangkang Mantit merupakan ritus pembuka pada Aruh Ganal Dayak Meratus di Desa Balawaian, Desa Pipitak Jaya, dan Desa Harakit di Kecamatan Piani. Aruh Ganal ialah upacara syukuran besar atau kenduri besar-besaran yang diadakan masyarakat adat Dayak Meratus setelah masa panen berakhir, ritus ini dilaksanakan setiap tahun dan merupakan rirus berulang tetap tahunan.
2	Langgatan	Pda langgatan terdapat berbagai macam anyaman, seperti halilipan, tangga galang, kalajengking, ringgitan. Langgatan digunakan sebagai bagian dan merupkan pusat kosmos ritus Aruh Ganal.
3	Panting	Panting terdiri dari beberapa macam bagian, yaitu: 1. kepala panting; 2) senar; 3) gulu panting (leher panting); 4) parut panting (perut panting); 5) puhun panting; dan 6) belakang panting. Dari keenam bagian tersebut, yang penting untuk ditelusuri dan diketahui lebih lanjut ialah kepala panting. Kepala panting merupakan bagian paling atas panting hingga leher panting.

4	Ranggaman	Ranggaman merupakan alat yang digunakan untuk mengatam atau memanen padi.
5	Panting Shalawat	Dalam perkembangannya di Kabupaten Tapin, Panting mengalami pembaharuan unsur dengan adanya pengaruh dari agama Islam melalui kesenian Hadroh (Hadrah), yang dikenal sebagai Panting Sholawat. Perbedaan musik panting tradisional dengan panting shalawat adalah terletak pada panting shalawat yang selalu membawakan lagu shalawat dan religi. Panting Shalawat berkembang dengan membawakan lagu-lagu atau musik shalawat. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapin yang mengusung “Tapin Mandiri, dan Sejahtera yang Agamis” (Tamasa), sehingga Panting Shalawat semakin dikenal dan diterima masyarakat Kabupaten Tapin.
6	Bagandut	Bagandut, adalah sebutan untuk jenis tarian khas Kab.Tapin. bagandut sendiri terbagi menjadi empat jenis tarian yaitu gandung mangandangan, Mandung-mandung, gandung Manunggul, Gandung Karuncungan. Tarian gandung ditarikan oleh perempuan, dengan lenggang lenggok ragam khas tari gandung, penari berusaha menarik perhatian penonton untuk ikut menari. Penonton yang ikut menari biasa meletakkan uang dalam sasangan sebagai wujud berbagi dalam hiburan tari-tarian.
7	Bakanjar Babangsai	Bakanjar dan Babangsai merupakan jenis tarian ritual Batandik balian, yang dimana tari Bakanjar ditarikan oleh para damang dan balian adat (Laki-laki pemuka adat) dan tari babangsai ditarikan oleh Pinjulang (Perempuan Pemuka adat)
8	Bapandung	Bapandung Adalah salah satu jenis teater tutur tradisi, yang pemetaan situsnya pernah ada di Kab.Tapin. disekitar wilayah Margasari. Bapandung merupan jenis teater tutur yang diperagakan oleh seorang pemain yang bisa berubah menjadi apa saja dan siapa saya, sesuai cerita yang dibawakannya. Dahulu bapandung biasanya mengangkat cerita tentang Fabel (Cerita Binatang).
9	Balogo	Balogo merupakan olahraga tradisional yang menggunakan logo atau tempurung kelapa yang pada sebagian permukaannya ditemplei aspal, sarang kelulut dan damar yang dicampur dengan minyak tanah. Logo tersebut kemudian dipukul dengan penapak yang berupa tongkat terbuat dari bambu berukuran ± 40 cm dan lebar ± 2 cm. Logo yang dipukul dimaksudkan untuk mampu mengenai Logo lawan dan menggeser Logo lawan agar keluar dari arena lapangan, sehingga dapat menjadi pemenang
10	Mamanda	Mamanda adalah salah satu jenis teater tradisi yang tumbuh dan berkembang di Daerah Kab.Tapin, tepatnya di Desa Pariuk Margasari Candi Laras. Mamanda merupakan teater tradisi khas Kab.Tapin, yang berbentuk istana sentris, yang biasanya berceritakan tentang 1001 malam, dan seputar kehidupan masyarakat sekitar kerajaan. Mamanda sendiri berasal dari syair-syair Abdul Muluk,

		yang dulunya dibawa oleh Sultan Abdul Muluk, pada zaman dahulu mamanda dikenal dengan sebutan Ba"Abdul Muluk atau Badamuluk. Mamanda Pada tahun ini direncanakan akan mendapatkan penghargaan Warisan Budaya Tak Benda.
11	Bakuntau	Bakuntau atau Kuntau merupakan bela diri yang tumbuh di Masyarakat Banjar dan berkembang di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Tapin. Adapun Kuntau berasal dari kata „Kun“ yang berarti „jadi“ dan „Tau“ yang berarti „isyarat“. Kuntau bisa juga diartikan sebagai kepalan tinju atau pukulan. Kuntau berkembang sejak masa penjajahan Belanda, sehingga dulunya Kuntau digunakan sebagai pertahanan untuk menjaga atau membela diri dari Belanda
12	Kerajinan Anyaman	Kerajinan Anyaman Kabupaten Tapin umumnya menggunakan bahan alami seperti purun (sejenis rumput rawa), bambu, atau rotan, yang dianyam dengan teknik tradisional untuk menghasilkan berbagai produk fungsional dan estetik.
13	Kuda Gipang Carita	Kuda Gipang Carita merupakan seni teater tradisi yang berlandaskan dari tari kuda gipang dan teater tradisi wayang gung (wayang orang). Kuda gipang carita ini selain sebagai media hiburan rakyat juga berfungsi untuk upacara penyambutan tamu, upacara ba"usung pangantin, dan upacara pengobatan.
14	Hadrah	Hadroh merupakan kesenian musik Islami dengan melantunkan kasidah atau syair-syair pujian terhadap Nabi Muhammad SAW yang diiringi rebana bersimbal dan disertai dengan gerak tari
15	Tari Paris Tangkawang	Tari Paris Tangkawang, merupakan jenis tari yang tumbuh dan berkembang di kab.Tapin. tepatnya di desa Tangkawang. Tari pari tangkawang sangat terkenal dengan ragam Jajak Paris yang sangat sukar di ikuti oleh penari-penari lain. Paris berasal dari Prize yang arti Pemberian, dan Tangkawang adalah nama sebuah tempat.
16	Kupiah Jangang	Di Margasari, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, berkembang kerajinan Kupiah Jangang. Sebutan kupiah jangang diambil dari kata kupiah dan jangang. Kupiah merupakan istilah lokal yang digunakan oleh masyarakat Banjar untuk menyebut kopiah, sedangkan jangang merupakan tanaman yang akarnya digunakan sebagai bahan baku kupiah.
17	Kain Sasirangan	Kain Sasirangan adalah kain tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan, Indonesia, yang dikenal dengan corak dan warna-warnanya yang khas. Terdapat beberapa perajin Kain Sasirangan di Kabupaten Tapin.
18	Anyaman Purun Margasari	Anyaman Purun Margasari adalah salah satu jenis kerajinan tradisional yang berasal dari Margasari, Kabupaten Tapin. Kerajinan ini menggunakan purun, sejenis tanaman air yang tumbuh di rawa- rawa atau sungai, yang diolah menjadi berbagai produk kerajinan tangan dengan teknik anyaman yang menghasilkan berbagai produk rumah tangga, hiasan, dsb.

19	Aruh Ganai	Merupakan acara ritual tahunan sebagai rasa syukur kepada yang maha kuasa atas limpahan hasil panen yang diperoleh pada tahun tersebut. Pelaksanaan Aruh pada satu balai biasanya berlangsung selama 3 hari 3 malam, atau bisa sampai 5 hari 5 malam. Dimana pada pelaksanaan tersebut dilakukan acara ritual berupa doa dan puji-pujian kepada Nining Sang Hyang Batara Tunggal.
20	Ba"ayun Maulid	Tradisi Budaya Tahunan yang dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal Di Mesjid Al-Mukarromah desa Banua Halat Kiri Kecamatan Tapin Utara, bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Merupakan satu dari 100 event Nasional yang selalu dihadiri ribuan wisatawan dari berbagai negara khususnya yang punya hajat, ataupun nazar untuk mengikuti dan mengambil berkah dari upacara tersebut. Bentuk ayunan yang berisi pernak-pernik unik yang bernilai filosofis menambah daya tarik tersendiri dan nilai spritual khusus yang di doakan oleh para habaib, ulama, para tokoh agama, diselingi dengan alunan syair Maulid Habsyi, Asyrakal, dan Shalawat
21	Alat Musik Panting	Musik Panting adalah salah satu musik tradisi yang secara pemetaan tumbuh dan berkembang di kab.Tapin. Musik panting adalah salah satu jenis hiburan rakyat dalam bentuk musik. Musik Panting juga bisa untuk mengiringi tari-tarian. Panting mempunyai arti petik, karna alat musik panting tersebut dipakai atau digunakan dengan cara dipetik.
22	Gamelan Banjar	Gamelan Banjar: merupakan jenis musik instrumental yang terdiri dari gong besar dan kecil; boning; saron besar dan kecil; kanong satu dan dua; kangsi; rebab; gambang; dan sarentem
23	Kurung-Kurung	Jenis Musik Tradisional Khas Dayak disepanjang Pegunungan Meratus. Terbuat dari perpaduan kayu ulin dan bambu yang diikat dengan rotan sepanjang 3 sampai 4 meter. Berfungsi sebagai alat penumbuk membuat lobang tanaman, dan menimbulkan bunyi ketika dihentak. Selain sebagai alat untuk membuat lubang tanam, kurung-kurung juga berfungsi untuk alat ritual pemanggil dewa agar padi yang ditanam menghasilkan dalam jumlah yang banyak.
24	Kalayangan Dandang	Kalayangan dandang merupakan permainan tradisional masyarakat Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebelum terbentuk Kabupaten Tapin, daerah Rantau berada dibawah daerah administratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga masyarakat yang bermain kalayangan dandang tersebar di Rantau hingga Kandangan. Kalayangan dandang berupa layang-layang besar yang biasanya dimainkan setelah musim panen selesai.
25	Huma Patawungan	Manugal huma patawungan atau mambuka huma patawungan merupakan ritus berulang tetap yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Meratus di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin sesuai perhitungan masa tanam tiap tahunnya. Huma atau bahuma merujuk pada pengertian di masyarakat yang diartikan sebagai aktivitas menanam padi. Bagi masyarakat Dayak Meratus, huma menjadi sumber kecukupan dan ketahanan pangan bersama, serta media komunikasi

		dengan Sang Hiyang Bahatara dan roh-roh leluhur mereka.
26	Wadai Baharu	Wadai Baharu adalah tradisi adat istiadat masyarakat peladang Dayak Meratus di Desa Balawaian, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan do'a para petani untuk dianugerahkan hasil panen yang melimpah, serta keselamatan dan kesehatan keluarga dan dirinya agar tidak diganggu oleh hal-hal yang buruk. Apabila doa tersebut terkabul, maka untuk mensyukuri karunia yang telah diberikan oleh Nining Bahatara dan roh-roh leluhur penjaga alam, masyarakat melaksanakan tradisi Wadai Baharu. Namun, jika Wadai Baharu tidak dilaksanakan, masyarakat mempercayai bahwa akan datang kemalangan dan malapetaka kepada dirinya dan keluarganya.
27	Mausung Pangantin	Bausung Pangantin merupakan upacara tradisi masyarakat kab.Tapin (Banjar). Bausung pangantin biasanya bermula dari nazar atau niat dari sang pengantin yang ingni upacara perkawinannya di meriahkan dengan upacara bausung pangantin. Di Kab.Tapin Bausung Pangantin biasanya di iringi oleh dengan iringan kuda gipang, atau bisa juga juga seni topeng pantul.
28	Haulan	Haulan atau Haul merupakan peringatan tahunan kematian seseorang. Masyarakat Banjar di Kabupaten Tapin sering menyelenggarakan dan merayakan Haulan bagi keluarga maupun tokoh yang dihormatinya.
29	Sejarah Lisan Candi Laras	Terdapat dalam beberapa cerita lisan yang berkembang di masyarakat, serta dalam sumber Hikayat Banjar.
30	Sejarah Lisan Datu Sanggul	Terdapat dalam beberapa cerita lisan yang berkembang di masyarakat, serta dalam sumber Manakib Datu Sanggul.
31	Sejarah Lisan Dayuhan Intingan (Masjid Banua Halat)	Terdapat dalam beberapa cerita lisan yang berkembang di masyarakat.
32	Wayang Topeng Carita	Berangkat dari seni topeng pantul, Ki Dalang Janderi mengembangkan dengan bentuk topeng yang berkarakterkan wayang, hingga lahir seni wayang topeng atau topeng carita. Bersandarkan cerita wayang purwa Banjar, kuda gipang, dan teater tradisi mamanda, wayang topeng kerap hadir dalam acara-acara yang ada di kab.Tapin. seni Wayang Topeng selain sebagai hiburan rakyat juga berfungsi untuk upacara penyambutan tamu, upacara ba"usung pangantin, dan upacara pengobatan.
33	Batimung	Batimung merupakan metode pengobatan dan kesehatan tradisional masyarakat Banjar dan Dayak Meratus yang dilakukan dengan mandi uap menggunakan rempah-rempah khas lokal. Adapun peralatan yang digunakan dalam batimung yaitu tikar purun, tapih balahai , periuk/kuantan tanah atau dalam perkembangannya menggunakan panci, pengaduk air, dan bangku pendek atau dingklik.

Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang Aktif 2025

NO	NAMA POKDARWIS	LOKASI ODTW POKDARWIS	SK POKDARWIS	NAMA DESTINASI
1	Pesona Baramban	Desa Baramban Kecamatan Piani	556.4/030-Dest/Budpar/VI/2021	Gua Baramban
2	Pesona Alam	Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun	188.45/218/KU M/2017	Gua Batu Hapu
3	Lok Buah	Lok. Buah Kecamatan Candi Laras Selatan	188.45/218/KU M/2017	Makam Datu Muning, Ekowisata Bakantan, dan Wisata Susur Sungai
4	Bina Putra Hatiwin	Desa Hatiwin Kecamatan Tapin Selatan	556.4/038-Dest/Budpar/IX/2021	Danau Hatiwin
5	Datu Sanggul	Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan	188.45/218/KU M/2017	Makam Datu Sanggul
6	Sendang Rejo	Desa Puncak Harapan Kecamatan Lokpaikat	556.4/029-Dest/Budpar/X/2020	Danau dan Pemancingan
7	Kayuh Baimbai	Jingah babaris	556.4/033-Dest/Budpar/VI/2021	Wisata Perkebunan
8	Singgasana galuh	Parandakan	556.4/029-Dest/Budpar/VI/2021	Sawah dan Kuliner
9	Lokdamar	Bataratat	556.4/034-Dest/Budpar/VI/2021	Persawahan
10	Pulau Pinang Indah	Pulau pinang	556.4/032-Dest/Budpar/VI/2021	Danau Resot
11	Peranginana n Ratu	Desa Budi Mulya Kecamatan Lokpaikat	556.4/033-Dest/Budpar/XII/2020	Danau
12	Datu Nuraya	Desa Tatakan	188.45/218/KU	Makam Datu

		Kecamatan Tapin Selatan	M/2017	Nuraya
13	Bina Wisata Danau	Desa Suatu Lama	556.4/031-Dest/Budpar/VI/2021	Danau Suatu Lama
14	Taratai	Margasari Hilir Kec.CLU	556.4/152-Dest/Budpar/X/2022	Susur Sungai Margasari

Data Destinasi Wisata yang dikelola dengan baik di Kabupaten Tapin Tahun 2024

No.	Benda Cagar Budaya	Alamat
1	Makam Guru Minin	Desa Binderang, Kec.Lokpaikat
2	Makam Nursitiwana	Desa Pabaungan, Kec.Candi Laras Selatan
3	Makam Pahlawan (Pambalah Batung)	Desa Margasari Ulu, Kec.Candi Laras Selatan
4	Makam Datu Dulung	Desa Tatakan, Kec.Tapin Selatan
5	Makam Datu Muning	Desa Sei. Rutas, Kec.Candi Laras Selatan
6	Makam KH. Abdul Karim	Desa Banua Halat Kiri, Kec.Tapin Utara
7	Makam H. Muhammad	Desa Batalas, Kec.Candi Laras Utara
8	Makam H.Muhammad Sa'ad	Desa Kesumagiri, Kec.Tapin Utara
9	Makam Datu Nuraya	Desa Tatakan, Kec.Tapin Selatan
10	Makam Syech Salman Al-Farisi	Desa Gadung, Kec.Bakarangan
11	Makam Datu Suban	Desa Tandui Tatakan, Kec.Tapin Selatan
12	Makam Datu Sanggul	Desa Tatakan, Kec.Tapin Selatan
13	Makam Pahlawan (Tasan Panyi)	Jl. Pahlawan, Kel. Rantau Kanan, Kec.Tapin Utara
14	RTH Rantau Baru	Jl. Brigjend H. Hasan Basery, Kec.Tapin Utara
15	Taman Basimban Taman Bermain Anak	Jl. Brigjend H. Hasan Basery, Kec.Tapin Utara
16	Goa Batu Hapu	Desa Hatungun, Kec. Hatungun
17	Goa Baramban	Desa Baramban, Kec. Piani
18	Makam Syarifah Aminah	Kelurahan Binuang, Kec. Binuang
19	Makam Datu Kabul	Desa Baulin, Kec. Candi Laras Utara
20	Candi Laras	Desa Candi Laras, Kec.Candi Laras Selatan
21	Rumah Adat Banjar (Bubungan Tinggi)	Desa Lawahan, Kec. Tapin Selatan
22	Makam Datu Aling	Desa Lawahan, Kec. Tapin Selatan

23	Makam Datu Ganun	Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan
24	Makam Assyarif Syech Muhdar bin Abdurrahman Azmatkhan	Kelurahan Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara
25	Makam Datu Tambal	Desa Tungkap, Kec. Binuang
26	Masjid Keramat Al Mukarromah	Ds. Banua Halat Kiri, Kec. Tapin Utara

Data Destinasi Wisata yang dipasarkan tahun 2024

No.	Nama Destinasi Wisata	Alamat
1	Makam Datu Nuraya	Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan
2	Makam Datu Suban	Desa Tandui Tatakan, Kec. Tapin Selatan
3	Makam Datu Sanggul	Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan
4	Goa Batu Hapu	Desa Hatungun, Kec. Hatungun
5	Goa Baramban	Desa Baramban, Kec. Piani
6	Danau Hatiwin	Desa Hatiwin, Kec. Tapin Selatan
7	RTH Rantau Baru	Jl. Brigjend. H. Hasan Basery Rantau
8	Makam Datu Aling	Desa Lawahan, Kec. Tapin Selatan
9	Masjid Keramat Al Mukarromah	Ds. Banua Halat Kiri, Kec. Tapin Utara
10	Plaza Kuliner Rantau Baru	Jl. Brigjend. H. Hasan Basery Rantau
11	Pondok Riam Mahony	Binuang
12	Taman Harapan	Jl. Keraton Raya
13	Makam Datu Gadung	
14	Taman Basimban	Jl. Brigjend. H. Hasan Basery Rantau

Daftar Rumah Makan dan Restaurant yang dibina Tahun 2024

NO	NAMA RUMAH MAKAN	ALAMAT
1	RM. Roda Baru Masakan Padang	Jl. A. Yani Binuang
2	RM. Pandan Wangi	Jl. A. Yani Binuang
3	RM. Beruntung	Jl. A. Yani KM. 85 Binuang
4	RM. Hanari	Jl. A. Yani Binuang
5	RM. Murah Meriah	Jl. A. Yani Binuang
6	RM. Pulau Pinang Indah	Jl. A. Yani KM. 92 Binuang
7	RM. Padang Galih Minang	Jl. A. Yani KM 93 Binuang
8	RM Padang Indah Cahaya	Jl. A. Yani KM 94
9	Warung Pinang Pak Haji	Jl. A. Yani KM. 103 Tambarangan
10	RM. Al - Barokah	Jl. A. Yani KM. 103 Tambarangan

11	RM. Rizky	JL. A. Yani Tambarangan
12	Warung Mayang	Jl.A.Yani Tambarangan
13	RM. Putri Minang	Jl.Bungur Rantau
14	RM. Amoy	JL. Jend. Sudirman Rantau
15	RM. Pawon Resto 2	JL. Jend. Sudirman Rantau
16	RM. Ibu Bahri	JL. Jend. Sudirman Rantau
17	RM. Mama Rika	JL. Jend. Sudirman Rantau
18	RM. Kalijo	Jl.Jend Sudirman Rantau
19	RM. Bundaran Dulang	JL.A. Yani Rantau
20	RM. Banaran	JL.A. Yani Rantau
21	RM. Wongsolo	JL.A. Yani Rantau
22	RM. Masakan Padang Hafiz	JL. Hasan Basry Rantau
23	RM. Srie	JL. Hasan Basry Rantau
24	RM. Ayam Penyet Surabaya	JL. H.Hasan Basery Rantau
25	RM. Mama Jibah	JL.Penghulu Kel. Randa Malingkung Rantau
26	RM. Pawon Resto 1	Jl.MTQ Rantau
27	RM. Ibu Siti	Jl.MTQ Rantau

Data Hotel/Penginapan yang dibina Tahun 2024

NO	NAMA HOTEL / PENGINAPAN	ALAMAT
1	Guest House “HH Syariah”	Jl.A. Yani No.03 RT.06 RW.02 Kel.Kupang Kec.Tapin Utara Kab.Tapin
2	Guest House “Mecca”	Jl.Brigjend H.Hasan Basry Bitahan Rantau
3	Hotel Tapin	Jl.Brigjend H.Hasan Basri Rantau
4	Hotel Pasupati 1	Jl. Hasan Basri No. IIA RT 06/RW 1 Rantau
5	Hotel Sejahtera 1	Jl.Penghulu No.3c Rantau Kel. Rangda Malingkung –Rantau
6	Hotel Sejahtera 2	Jl. Jend. Sudirman No. 2c Kel. Rangda Malingkung By Pass Rantau
7	Hotel Tanpa Nama	Jl.Pembangunan
8	Hotel Wahyu	Jl.Pembangunan No.6 Rantau
9	Penginapan	Jl.Perintis Raya Rt.1 No.35 Rantau

	Mama-Ibu	
10	Penginapan Raizsa	Jl.A.Yani Kec.Binuang
11	Penginapan Mira	Jl.A.Yani Kec.Binuang
12	Mess Family	Jl. Transat Binuang
13	Home Nabila	Jl. Bir Ali Rt. 1 Ds. Banua Halat
14	Losmen Keraton	Jl. Jl. Kesumajaya No. 47

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Disbudpar, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappeda berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran (Tabel 2.3)

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Tapin
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
2	22				URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2	22	01			2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	24.67	24.6	24.67	24.67	100.00	24.67	24.6	99.72
						Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	22.75	23.1	22.75	22.75	100.00	22.75	23.1	101.54
						Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	15.25	12	15.25	15.25	100.00	15.25	12	78.69
						Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	12.3	19.25	12.3	12.3	100.00	12.3	19.25	157
						Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100.00	100	100	100
						Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90	90	90	90	100.00	90	90	100
						Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (score)	4.3	4	4.3	4.3	100.00	4.3	4	93.02

2	22	01	2.01		2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100	100	100	46.15	46.15	100	100	100.00
2	22	01	2.01	06		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100	13	100	50.00	50.00	100	13	13.00
2	22	01	2.02		2.22.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rtealisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	13	13	6	46.15	13	13	100
2	22	01	2.02	01	2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100	100	100	25	25.00	100	100	100.00
2	22	01	2.02	05		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100	100	100	25	25.00	100	100	100.00
2	22	01	2.02	07	2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	276	276	276	132	1	276	276	100

2	22	01	2.06		2.22.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
2	22	01	2.06	01	2.22.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	1	12	1	0	0	1	12	1200
2	22	01	2.06	02	2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100	100	100	50	50.00	100	12	12.00
2	22	01	2.06	04	2.22.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	12	12	6	50	12	12	100
2	22	01	2.06	05	2.22.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	12	6	50	12	12	100
2	22	01	2.06	07	2.22.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	12	6	50	12	12	100
2	22	01	2.06	08	2.22.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	12	12	6	50	12	12	100

2	22	01	2.06	09	2.22.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksana fasilitas kunjungan tamu	12	12	12	0	0	12	12	100
2	22	01	2.07		2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	100	12	6	50	12	100	833.3
2	22	01	2.07	06	2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100	100	100	50	50.00	100	100	100.00
2	22	01	2.07	10	2.22.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	7	4	0	0	4	7	175
2	22	01	2.08		2.22.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10	7	10	0	0	10	7	70
2	22	01	2.08	02	2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100	100	100	50	50.00	100	100	100.00
2	22	01	2.08	04	2.22.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	12	6	50	12	12	100
2	22	01	2.09		2.22.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	6	50	12	12	100
2	22	01	2.09	01	2.22.01.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100	100	100	50	50.00	100	100	100.00

2	22	01	2.09	06	2.22.01.2.09 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	1	12	1	0	0	1	12	1200
2	22	01	2.09	09	2.22.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	12	12	0	0.00	12	12	100
2	22	02			2.22.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/d rehabilitasi	12	12	12	0	0	12	12	100
2	22	02	2.01		2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	persentase seni budaya yang dimanfaatkan	50	88.57	45	17.5	38.89	45	88.57	196.82
						persentase seni budaya yang dimanfaatkan	14,5			5				
2	22	02	2.01	02	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase event adat budaya yang terlaksana pada Calendar of Events	100	31	45	66.6	148.00	45	31	68.89
						persentase event adat budaya yang masuk CoE	76			76.4				
2	22	02	2.02		2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5	1	5	0	0	5	1	20
2	22	02	2.02	01	2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50	1	50	0	0	50	1	2

2	22	02	2.02	03	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase kelembagaan seni budaya yang dibina	30	14	30	10.00	33.33	30	14	46.67
						persentase sanggar seni budaya yang sesuai standar			10	17,5	#VALUE!	10		
						persentase sanggar seni budaya yang mendapatkan pelatihan			50	80.00	160.00	50		
						Persentase SDM pelaku seni budaya yang mengikuti Bimtek bersertifikat			30	1,81	#VALUE!	30		
						persentase peningkatan SDM pelaku seni budaya yang terampil			30	0,82	#VALUE!	30		
2	22	02	2.03		2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5	6	5	0	0	5	6	120
2	22	02	2.03	01	2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	4	1	4	1	25	4	1	25
2	22	02	2.03	02	2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10	10	10	0	0	10	10	100

2	22	03			2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase karya budaya yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda	16	7	55	24	43.64	55	7	12.73
						Persentase karya budaya yang terdata dalam database DAPOBUD sebagai warisan budaya tak benda	0	0	20	10	50.00	20	10	50.00
2	22	03	2.01		2.22.02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangandan Pemanfaatan	7	25	7	19	271.4285714	7	25	357.14
2	22	03	2.01	01	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	persentase kelembagaan seni budaya yang dibina	45	40	45	0.71	1.58	45	40	88.89
						persentase kelembagaan seni budaya yang dikembangkan				10.00				
2	22	05			2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanggar seni/ budaya yang terbina	40	10	40	10.00	25.00	40	10	25.00
					2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100	50	100	0	0	100	50	50

2	22	05	2.01		2.22.03.2.01.02 Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	100	50	100	38	38	100	50	50
2	22	05	2.01	01	2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Tata Kelola	3	50	3	32	1066.67	3	50	1666.7
					2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang terawat dengan baik	100	100	100	50.00	0.50	100	100	100
						Persentase Cagar Budaya Tak Benda yang terpelihara	40	67.51	40	15,75	0.39	40	67.51	168.775
					2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Benda Cagar Budaya yang terdaftar	30	27	30	27.00	90.00	30	27	90.00
					2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5	27	5	1	20	5	27	540
					2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara	70	27	70	27.00	38.57	70	27	38.57
					2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	27	27	27	24	88.89	27	27	100
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN BIDANG PARIWISATA									
3	26	02			3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik	78	67.27	78	5.00	6.41	78	67.27	86.24
3	26	02	2.02		3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi yang terpelihara	40	1	40	7.00	17.50	40	1	2.50

3	26	02	2.02	04	3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	1	1	0	0	1	1	100
3	26	02	2.03		3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana destinasi wisata yang terpenuhi	20	4	20	5,5	27.50	20	4	20.00
3	26	02	2.03	03	3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	4	4	5	125	4	4	100
3	26	03			3.26.02.2.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	4	4	8	200	4	4	100
3	26	03	2.01		3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	20	25	20	5.00	25.00	20	25	125.00
3	26	03	2.01	01	3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5	4	5	5	100	5	4	80
3	26	03	2.01	02	3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata terbina	25	23.00	25	23.00	92.00	30	25.00	83.33

3	26	03	2.01	03	3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	4	4	4	0	0.00	4	4	100
					3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan	30	25.45	30	5.00	16.67	50	25	50
					3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase event pariwisata yang terlaksana	60	14	50	20.00	40.00	50	14	28.00
					3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4	4	4	1	25	4	4	100
					3.26.03.2.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4	8	4	2	50	4	8	200
					3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4	85	4	3	75	4	85	2125
					3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1	1	1	1	100	1	1	100

				3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina	40	47.47	40	2.00	5.00	40	47.47	118.675
				3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina	30	1	30	0.00	0.00	30	1	3.33
				3.26.04.2.02.09 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kretif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	1	1	0	0	1	1	100
				3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina	40	47.47	40	5.00	12.50	40	47.47	118.675
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	PersentasePelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang aktif	30	42	30	5.00	16.67	30	42	140.00
				3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100	0	100	50	50	100	0	0

					3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	50	50	50	0	0	50	50	100
					3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4	50	4	0	0	4	50	1250
					3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	PersentasePelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang aktif	30	42	30	0	0.00	30	42	140.00
					3.26.05.2.02.01 Pelatihan Bimbingan teknis dan Pendampingan ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50	50	50	0	0	50	50	100

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Tapin

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13
1	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)			20	25	30	40	-55.6	25,22	66.80%	45,48	4	4	
2	Rata-Rata Lama Tinggal wisatawan								-	3 jam 45 menit	3 jam 42 menit	3 jam 45 menit	3 jam 50 menit	
3	Rata-Rata Belanja Wisatawan								-	Rp566,758	Rp595,000	Rp600,000	Rp610,000	
4	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)			70	80	90	100	100	100	100%	18,18	0	0	
5	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%)			40	45	50	60	46	48,63	67.51%	71,28	0	0	
6	Persentase Cagar Budaya yang diletakkan (%)											7.14	10	
7	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang diletakkan (%)											27.27	20	
6	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase sarana dan prasarana (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase sanggar seni budaya saerah yang aktif (%)			50	65	75	80	40	41.37	41.37	75	80	80	
10	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah (%)			85	90	95	100	14.81	24.13	24.13	95	100	100	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2026
Kabupaten Tapin
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	24.67	5,406,804,568.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	24.67	5,406,804,568.00	
			Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	22.75				Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	22.75		
			Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	15.25				Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	15.25		
			Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	12.3				Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	12.3		
			Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100		
		TAPIN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90			TAPIN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90		
		Kabupaten Tapin	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (score)	4.3			Kabupaten Tapin	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (score)	4.3		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TAPIN				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TAPIN				
		Kabupaten Tapin	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100	10,543,600.00		Kabupaten Tapin	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100	10,543,600.00	

		Kabupaten Tapin	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	4			Kabupaten Tapin	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tapin				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tapin				
		TAPIN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	13	10,543,600.00		TAPIN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	13	10,543,600.00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaupaten Tapin			3,836,834,153.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaupaten Tapin			3,836,834,153.00	
		Kabupaten Tapin	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100			Kabupaten Tapin	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100		
		Kabupaten Tapin	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100			Kabupaten Tapin	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tapin				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tapin				
		Kabuapate n Tapin	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22	3,828,646,753.00		Kabuapate n Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	3,828,646,753.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indonesia				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indonesia				
		TAPIN	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1.00	4,173,200.00		TAPIN	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1.00	4,173,200.00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Tapin				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Tapin				
		Kabupaten Tapin	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1.00	4,173,200.00		Kabupaten Tapin	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1.00	4,173,200.00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tapin				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tapin				
		TAPIN	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100	993,587,480.00		TAPIN	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100	993,587,480.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tapin				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tapin				
		Kabupaten Tapin	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12.00	6,148,000.00		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	6,148,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TAPIN				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TAPIN				
		Kabupaten Tapin	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12.00	66,331,300.00		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	66,331,300.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tapin				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tapin				
		Kabupaten Tapin	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12.00	324,667,180.00		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	324,667,180.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.00	20,098,800.00			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.00	20,098,800.00	
	Penyediaan Bahan/Material					Penyediaan Bahan/Material					
		TAPIN	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12.00	3,065,200.00		TAPIN	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12.00	3,065,200.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Tapin				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Tapin				
		Kabupaten Tapin	Terlaksanya fasilitasi kunjungan tamu	5.00	5,470,000.00		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.00	5,470,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TAPIN				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TAPIN				
		Kabupaten Tapin	Terlaksananya penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12.00	567,807,000.00		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12.00	567,807,000.00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tapin				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tapin				
		Kabupaten Tapin	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100	135,448,200.00		Kabupaten Tapin	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%) (%)	100	135,448,200.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TAPIN				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TAPIN				
		Kabupaten Tapin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2.00	79,556,500.00		Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.00	79,556,500.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		TAPIN	Jumlah unit Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10.00	55,891,700.00		TAPIN	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10.00	55,891,700.00	

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapin			379,615,220.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapin			379,615,220.00	
		Kabupaten Tapin	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100			Kabupaten Tapin	persentase kelulusan ASN Disbudpar yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN (Dengan Satuan:%) (%)	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tapin				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tapin				
			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12.00	181,813,220.00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	181,813,220.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TAPIN				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TAPIN				
		Kabupaten Tapin	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12.00	197,802,000.00		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	197,802,000.00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TAPIN			50,775,915.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TAPIN			50,775,915.00	
		Kabupaten Tapin	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%)	100			Kabupaten Tapin	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%)	100		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		TAPIN	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	1.00	36,185,800.00		TAPIN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.00	36,185,800.00	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapin				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapin				
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5.00	14,590,115.00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.00	14,590,115.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/di rehabilitasi	1.00	23,080,300.00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	23,080,300.00	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TAPIN	persentase seni budaya yang dimanfaatkan	50	773,250,900.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TAPIN			773,250,900.00	
			persentase seni budaya yang dimanfaatkan	14,5							
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				
		Kabupaten Tapin	persentase event adat budaya yang terlaksana pada Calendar of Events	100	64,386,500.00		Kabupaten Tapin	persentase event adat budaya yang terlaksana pada Calendar of Events	58	64,386,500.00	
		Kabupaten Tapin	persentase event adat budaya yang masuk CoE	76			Kabupaten Tapin	persentase event adat budaya yang masuk CoE			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	TAPIN				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	TAPIN				
		Kabupaten Tapin	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	15.00	47,412,800.00		Kabupaten Tapin	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	15.00	47,412,800.00	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	TAPIN				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	TAPIN				

		Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40.00	16,973,700.00		Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40.00	16,973,700.00	
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
		TAPIN	persentase kelembagaan seni budaya yang dibina	30	532,111,900.00		TAPIN	persentase kelembagaan seni budaya yang dibina	30	532,111,900.00	
		TAPIN	persentase sanggar seni budaya yang sesuai standar	10				persentase sanggar seni budaya yang sesuai standar	10		
		TAPIN	persentase sanggar seni budaya yang mendapatkan pelatihan	50				persentase sanggar seni budaya yang mendapatkan pelatihan	50		
		TAPIN	Persentase SDM pelaku seni budaya yang mengikuti Bimtek bersertifikat	30				Persentase SDM pelaku seni budaya yang mengikuti Bimtek bersertifikat	30		
		TAPIN	persentase peningkatan SDM pelaku seni budaya yang	30				persentase peningkatan SDM pelaku seni budaya yang	30		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kabupaten Tapin				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kabupaten Tapin				
		Kabupaten Tapin	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6.00	69,967,300.00		Kabupaten Tapin	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	6.00	69,967,300.00	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kabupaten Tapin				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kabupaten Tapin				
		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2.00	462,144,600.00		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.00	462,144,600.00	

	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					
		TAPIN	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10.00	0		TAPIN	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	10.00	0	
3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin			176,752,500.00	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin			176,752,500.00	
			Persentase karya budaya yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda	16				Persentase karya budaya yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda	16		
			Persentase karya budaya yang terdata dalam database DAPOBUD sebagai warisan budaya tak benda	20				Persentase karya budaya yang terdata dalam database DAPOBUD sebagai warisan budaya tak benda	20		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	TAPIN				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	TAPIN				
		Kabupaten Tapin	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7.00	176,752,500.00		Kabupaten Tapin	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	7.00	176,752,500.00	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kabupaten Tapin	persentase kelembagaan seni budaya yang dibina	50	477,923,640.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kabupaten Tapin	persentase kelembagaan seni budaya yang dibina	50	477,923,640.00	
		Kabupaten Tapin	persentase kelembagaan seni budaya yang dikembangkan	15			Kabupaten Tapin	persentase kelembagaan seni budaya yang dikembangkan	15		

1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	TAPIN			477,923,640.00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	TAPIN			477,923,640.00	
		Kabupaten Tapin	persentase event seni budaya yang terlaksana pada Calendar of Events Daerah	75			Kabupaten Tapin	persentase event seni budaya yang terlaksana pada Calendar of Events Daerah	75		
			Persentase event seni budaya yang diikuti sesuai Kalender Event Luar Daerah	30				Persentase event seni budaya yang diikuti sesuai Kalender Event Luar Daerah	30		
			persentase sanggar seni budaya yang tampil sesuai kriteria	50				persentase sanggar seni budaya yang tampil sesuai kriteria	50		
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kabupaten Tapin				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50.00	152,333,900.00			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50.00	152,333,900.00	
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kabupaten Tapin				Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	50.00	155,509,740.00			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	50.00	155,509,740.00	
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kabupaten Tapin				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kabupaten Tapin				

			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Tata Kelola	4.00	170,080,000.00			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	4.00	170,080,000.00	
IV	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kabupaten Tapin			188,567,200.00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kabupaten Tapin			188,567,200.00	
			persentase kelembagaan seni budaya yang dibina	50				persentase kelembagaan seni budaya yang dibina	50		
1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				
			persentase sanggar seni budaya yang tampil sesuai kriteria	50	20,950,000.00			persentase sanggar seni budaya yang tampil sesuai kriteria	50	20,950,000.00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kabupaten Tapin				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	1.00				Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	1.00		
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kabupaten Tapin				Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1.00				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1.00		
V	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kabupaten Tapin	persentase cagar budaya yang dilindungi	19	188,567,200.00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kabupaten Tapin	persentase cagar budaya yang dilindungi	19	188,567,200.00	
			persentase warisan budaya takbenda yang dilindungi	16.6				persentase warisan budaya takbenda yang dilindungi	16.6		
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				
			persentase peningkatan cagar budaya yang didaftarkan	36	20,950,000.00			persentase peningkatan cagar budaya yang didaftarkan	36	20,950,000.00	
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kabupaten Tapin				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4.00	20,950,000.00			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4.00	20,950,000.00	

	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				
			persentase cagar budaya yang dipelihara sesuai dengan aslinya	96,3	167,617,200.00			persentase cagar budaya yang dipelihara sesuai dengan aslinya	96,3	167,617,200.00	
	Pelindungan Cagar Budaya	Kabupaten Tapin				Pelindungan Cagar Budaya	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	25	167,617,200.00			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	25	167,617,200.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		persentase cagar budaya yang dilindungi	19	0	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		persentase cagar budaya yang dilindungi	19	0	
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				
			persentase cagar budaya yang dipelihara sesuai dengan aslinya	96,3	0			persentase cagar budaya yang dipelihara sesuai dengan aslinya	96,3	0	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kabupaten Tapin				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1.00	0			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1.00	0	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kabupaten Tapin				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kabupaten Tapin				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1,333,784,400.00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1,333,784,400.00	
			Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik	19.6				Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik (%)	19.6		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				

			Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang terpelihara	8.3	0.00			Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang terpelihara	8.3	0.00	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	1	0			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	1	0	
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00	0			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00	0	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				
			Persentase Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang terealisasi	8.3	291,744,600.00			Persentase Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang terealisasi	8.3	291,744,600.00	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	291,744,600.00			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	4	291,744,600.00	

	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	4	0			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	4	0	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				
			persentase sarana dan prasarana yang tersedia pada destinasi wisata	8.3	1,042,039,800.00			persentase sarana dan prasarana yang tersedia pada destinasi wisata	8.3	1,042,039,800.00	
			Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang terpelihara	8.3				Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang terpelihara	8.3		
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2	1,042,039,800.00			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2	1,042,039,800.00	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				
			Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang Aktif (Dengan Satuan:%) (%)	25	0			Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang Aktif (Dengan Satuan:%) (%)	25	0	
	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				

			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	2.00	0			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	2.00	0	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase kerjasama untuk pemasaran pariwisata daerah sesuai yang ditargetkan		408,578,750.00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				408,578,750.00	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin			408,578,750.00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin			408,578,750.00	
			Persentase Destinasi Dan Daya Tarik Wisata yang dipromosikan melalui sosial media	25				Persentase Destinasi Dan Daya Tarik Wisata yang dipromosikan melalui sosial media	25		
			Persentase event yang diikuti	25				Persentase event yang diikuti	25		
			Persentase kalender of event yang terlaksana	60				Persentase kalender of event yang terlaksana	60		
			Persentase data dan informasi pariwisata yang berkualitas	70				Persentase data dan informasi pariwisata yang berkualitas	70		
			Persentase Konten promosi Destinasi dan Daya tarik wisata yang dipublikasikan	25				Persentase Konten promosi Destinasi dan Daya tarik wisata yang dipublikasikan	25		
			Jumlah Event yang memenuhi standart event kabupaten	63				Jumlah Event yang memenuhi standart event kabupaten	63		
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Tapin				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4	181,186,650.00			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4	181,186,650.00	

	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Tapin				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4	57,498,000.00			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4	57,498,000.00	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4.00	126,207,500.00			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	4.00	126,207,500.00	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Tapin				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4	43,686,600.00			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	4	43,686,600.00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				55,624,850.00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				55,624,850.00	
			Persentase Pertumbuhan pelaku Ekonomi Kreatif	5				Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (%)	5		
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tapin				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tapin				

			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terdata	35	55,624,850.00			Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina. (Dengan Satuan:%) (%)	35	55,624,850.00	
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tapin				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1.00				Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1.00		
	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Kabupaten Tapin				Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1.00	55,624,850.00			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	1.00	55,624,850.00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Persentase Pertumbuhan pelaku Ekonomi Kreatif	5	223,343,400.00			Persentase Kelompok Sadar Wisata yang aktif (%)	5	223,343,400.00	
			Persentase Peningkatan pelaku usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	25				Pertumbuhan Pelaku Usaha Pariwisata. (%)	25		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kabupaten Tapin				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kabupaten Tapin				
			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	8.7	165,632,200.00			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	8.7	165,632,200.00	
			persentase pelaku usaha pariwisata yang terbina	25				persentase pelaku usaha pariwisata yang terbina	25		
			Persentase pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan bimbingan teknis bersertifikat	20				Persentase pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan bimbingan teknis bersertifikat	20		

	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tapin				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1.00	0			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	1.00	0	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tapin				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tapin				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100	70,421,200.00			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	100	70,421,200.00	
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Tapin				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Tapin				
			Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	100	95,211,000.00			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	100	95,211,000.00	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tapin				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tapin				
			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bimbingan teknis bersertifikat	3.6	57,711,200.00			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bimbingan teknis bersertifikat	3.6	57,711,200.00	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tapin				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tapin				

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	25	57,711,200.00			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	25	57,711,200.00	
	TOTAL				8,890,958,008.00					8,890,958,008.00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD Disbudpar Kabupaten Tapin selama tahun 2026 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan, Bahasa, dan Sastra Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah melakukan proses registrasi budaya yang mencakup tahapan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan. Selain menjalankan pelestarian cagar budaya, pemerintah juga bertugas menjalankan pemajuan kebudayaan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Usaha pemajuan kebudayaan ini dijalankan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan serta pembinaan Sumber Daya Manusia bidang kebudayaan.

Pelindungan terdiri dari:

1. Inventarisasi,
2. Pengamanan,
3. Pemeliharaan,
4. Penyelamatan dan
5. Publikasi.

Pengembangan terdiri dari:

1. Penyebarluasan,
2. Pengkajian dan

Pengayaan keragaman.

Sedangkan Pemanfaatan untuk:

1. Penguatan karakter dan ketahanan budaya,
2. Kesejahteraan masyarakat,
3. Peningkatan peran dan pengaruh internasional.

Pembinaan terdiri dari:

1. Peningkatan mutu dan jumlah SDM,
2. Standarisasi dan sertifikasi SDM,
3. Peningkatan mutu tata kelola.

Tujuan terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air.
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible).
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia.
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional

yang lebih banyak.

7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkaitan dengan program Kemendikbud adalah :

1. Program Pemanfaatan Unsur Kebudayaan
2. Program Perlindungan dan Pelestarian Unsur Budaya
3. Program Pembinaan Unsur Kebudayaan, dan
4. Program Pengembangan Unsur Kebudayaan

Berdasarkan Renstra Kementerian Pariwisata 2024-2026, tujuan Kementerian Pariwisata 2024-2026 adalah :

1. Nilai Devisa Pariwisata;
2. Kontribusi PDB Pariwisata;
3. Nilai ekspor produk ekonomi.

Kementerian Pariwisata memiliki 11 sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2024–2026, yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi
2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional
3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan
4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional
5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan
6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian
9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif

11. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif menuju birokrasi yang profesional

Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkaitan dengan Program Kementerian Pariwisata adalah :

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata
3. Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata, dan
4. Program Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan, maka tujuan pembangunan yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisnus dan wisman.
2. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.

Sasaran Dinas Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan perekonomian masyarakat disekitar ODTW (melalui usaha / industri pariwisata)
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan local terhadap sapta pesona

3. Meningkatkan pembangunan destinasi pariwisata di ODTW

Strategi Dinas Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku usaha wisata / industri wisata di sekitar ODTW
2. Meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan
3. Meningkatkan jumlah kelompok sadar wisata yang berperan sebagai pelopor penerapan sapta pesona di ODTW Pembinaan kelompok

sadar wisata Meningkatnya pembangunan destinasi pariwisata di ODTW

4. Memfokuskan pembangunan destinasi pariwisata pada DPP dan KSPP yang sudah ditetapkan melalui PERDA Kalsel No. 11 Tahun 2013 tentang RIPPARDA 2013 – 2028
5. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi percepatan pembangunan pariwisata bersama SKPD terkait.

Sedangkan kebijakan yang diambil oleh Dinas Pariwisata Propinsi Kalimantan selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaku usaha bidang pariwisata melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
2. Memasarkan destinasi pariwisata melalui promosi pariwisata pada event / kegiatan kepariwisataan ataupun melalui media promosi;
3. Memaksimalkan publikasi dan promosi dengan memanfaatkan media promosi baik melalui cetak ataupun elektronik;
4. Menetapkan destinasi pariwisata prioritas;
5. Membangun amenitas pariwisata di destinasi pariwisata prioritas;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi percepatan pembangunan pariwisata bersama SKPD terkait;
7. Mendorong kab/kota dalam pengembangan kepariwisataan terkait kewenangan di daerahnya masing – masing.

Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkaitan dengan Program Kementerian Pariwisata adalah :

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata
3. Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata, dan
4. Program Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 tujuan yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

1. meningkatkan kualitas lembaga dan pelaku kebudayaan dengan

sasaran meningkatnya kelestarian budaya daerah.

2. Meningkatkan kualitas kehidupan social masyarakat melalui kebudayaan dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebudayaan.

Strategi yang berkaitan dengan Kebudayaan antara lain :

1. Meningkatkan peran serta pelaku budaya dalam mengembangkan, memanfaatkan dan melindungi kebudayaan;
2. Peningkatan peran taman budaya dalam mengembangkan kebudayaan;
3. Peningkatan peran museum dalam konteks pelestarian budaya.

Kebijakan yang berkaitan dengan kebudayaan antara lain :

1. Melakukan pembinaan terhadap pelaku budaya
2. Memberikan apresiasi terhadap seniman dan budayawan yang berdedikasi melalui pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan budaya;
3. Pemanfaatan peran taman budaya sebagai wadah para seniman dan budayawan untuk meningkatkan ketahanan dan penguatan budaya dan kearifan local; dan
4. Pemantapan peran museum sebagai sarana pelestarian benda cagar budaya.

Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin yang berkaitan dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun adalah program pengembangan unsur kebudayaan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD DISBUDPAR KABUPATEN TAPIN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja SKPD Disbudpar Kabupaten Tapin selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran SKPD Disbudpar Kabupaten Tapin 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Tapin
Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN DISBUDPAR	SASARAN DISBUDPAR	INDIKATOR	SATUAN	Target 2026
Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah			Nilai SAKIP	poin	74,90
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Disbudpar	Nilai SAKIP Disbudpar	score	80
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai Indeks IP-ASN Disbudpar	poin	80
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Pariwisata Unggulan Daerah			LPE Kategori pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	7,52
	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	%	26
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	Jam	5 jam 30 menit
			Rata-rata belanja wisatawan	Rp	620.000
		Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan	%	30,30
			Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	%	10,71

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin pada tahun 2026 yang mengacu pada renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 dan rancangan awal RKPD tahun 2026 serta berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2025-2029

Program kegiatan dan sub kegiatan SKPD Disbudpar Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran (Tabel 3.2)

	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	10,543,600.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	13 Laporan	11,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100	100	100	100	3,836,834,153.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	100	3,309,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100	100	100	100							100		
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22	22	23	260	3,828,646,753.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	26	3,300,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,173,200.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	1 Laporan	4,500,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,014,200.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	1 Laporan	4,500,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	90	90	90	90	993,587,480.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	90	1,164,300,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6,148,000.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Paket	7,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	66,331,300.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Paket	72,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	324,667,180.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Paket	350,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20,098,800.00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Paket	25,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3,065,200.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Paket	4,300,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5,470,000.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	4 Laporan	6,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	567,807,000.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Laporan	700,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	135,448,200.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	-	210,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	10 Unit	1 Unit	12 Unit	79,556,500.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	15 Unit	150,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	10 Unit	1 Unit	2 Unit	55,891,700.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Unit	60,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100	100	100	100	379,615,220.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	100	375,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	181,813,220.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Laporan	175,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	197,802,000.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Laporan	200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik</i>	100	100	100	100	50,775,915.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	100	50,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya</i>	2	2	2	2	36,185,800.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	2	35,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</i>	20	20	20	120	14,590,115.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	20	15,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2	2	2	2						2			
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Jumlah promosi seni budaya yang terlaksana</i>					773,250,900.00						-	540,000,000.00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase event adat budaya yang terlaksana pada Calendar of Events</i>	-			-	64,386,500.00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat	-	110,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

			Persentase SDM pelaku seni budaya yang mengikuti Bimtek														
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				3 Objek	69,967,300.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat			80,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				10	462,144,600.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat			150,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				10 Sertifikat	0.00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat			0.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengikutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase karya budaya yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda	-			-	176,752,500.00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat	-		200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

			Persentase karya budaya yang terdata dalam database DAPOBUD sebagai warisan budaya tak benda													
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				20 Objek	176,752,500.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat		200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	persentase kelompok seni budaya yang aktif					477,923,640.00						-	630,000,000.00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event seni budaya yang diikuti sesuai Kalender Event Luar Daerah	-			-	477,923,640.00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat	-	630,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Jumlah Kerjasama Event Seni													
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				500	152,333,900.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat		200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				40 Sertifikat	155,509,740.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat		200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				47 Lembaga	170,080,000.00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat		230,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						188,567,200.00					-		225,000,000.00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	20,950,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat	-	25,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				3 Objek	20,950,000.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat		25,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	persentase cagar budaya yang dipelihara sesuai dengan aslinya	-			-	167,617,200.00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat	-	200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				25 Objek	167,617,200.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat		200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2,044,411,700.00							5,950,000,000.00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						2,044,411,700.00							5,950,000,000.00	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik (Attraction, Amenity, Accesibility)					1,333,784,400.00						-	4,500,000,000.00	

	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang terpelihara	-				-	291,744,600.00			Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	03. Peningk atan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Per dagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berk elanjutan Pemenuha n konektivitas, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat	-	500,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Persentase Master Plan Destinasi Wisata yang menjadi DED														
			Persentase DED yang terealisasi														
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					2 Unit	291,744,600.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	03. Peningk atan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Per dagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berk elanjutan Pemenuha n konektivitas, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat		500,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Atraksi di destiasi wisata	-			-	1,042,039,800.00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	03. Peningk atan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Per dagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berk elanjutan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat	-	4,000,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1,042,039,800.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	03. Peningk atan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Per dagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berk elanjutan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat		4,000,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kerjasama untuk pemasaran pariwisata daerah					408,578,750.00						-	600,000,000.00	

	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Dan Daya Tarik Wisata yang dipromosikan melalui sosial media	-				-	408,578,750.00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemanfaatan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan Pemenuhan konektivitas, pemanfaatan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyarakat	-	600,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Persentase event yang diikuti															
			Persentase kalender of event yang terlaksana															
			Tersedianya data dan informasi pariwisata yang berkualitas															
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Dokumen		181,186,650.00	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemanfaatan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan Pemenuhan konektivitas, pemanfaatan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyarakat		250,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen		57,498,000.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemanfaatan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan Pemenuhan konektivitas, pemanfaatan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyarakat		100,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	126,207,500.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pempa ngunan Infr astruktur Dasar dan Perekonom ian Berbasis K ewilayahan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat		200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Promosi	43,686,600.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pempa ngunan Infr astruktur Dasar dan Perekonom ian Berbasis K ewilayahan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat		50,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pertumbuhan pelaku Ekonomi Kreatif					55,624,850.00						-	100,000,000.00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terdata	-			-	55,624,850.00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pempa ngunan Infr astruktur Dasar dan Perekonom ian Berbasis K ewilayahan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat	-	100,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				1 Dokumen	55,624,850.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusaha an, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pempa ngunan Infr astruktur Dasar dan Perekonom ian Berbasis K ewilayahan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat		100,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang terlatih					223,343,400.00						-	700,000,000.00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	persentase pelaku usaha pariwisata yang terbina	-			-	165,632,200.00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusaha an, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pempa ngunan Infr astruktur Dasar dan Perekonom ian Berbasis K ewilayahan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat	-	550,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Persentase Pokdarwis yang dibina													
			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina													
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				0 Laporan	0.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusaha an, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pempa ngunan Infr astruktur Dasar dan Perekonom ian Berbasis K ewilayahan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat		300,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				50 0	70,421,200.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemanfaatan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan Pemenuhan konektivitas, pemanfaatan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyarakat		100,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				50 Orang	95,211,000.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemanfaatan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan Pemenuhan konektivitas, pemanfaatan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyarakat		150,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bimbingan teknis bersertifikat	-			-	57,711,200.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemanfaatan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan Pemenuhan konektivitas, pemanfaatan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyarakat	-	150,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				20 Orang	57,711,200.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pempa ngunan Infr astruktur Dasar dan Perekonom ian Berbasis K ewilayahan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat		150,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	J U M L A H							8,890,958,008.00							12,464,300,000.00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

1.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.

Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif Disbudpar tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran (Tabel 4.1):

	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	10,543,600.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	13 Laporan	11,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100	100	100	100	3,836,834,153.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	100	3,309,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100	100	100	100							100		
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22	22	23	260	3,828,646,753.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	26	3,300,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,173,200.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	1 Laporan	4,500,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,014,200.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	1 Laporan	4,500,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	90	90	90	90	993,587,480.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	90	1,164,300,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6,148,000.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Paket	7,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	66,331,300.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Paket	72,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	324,667,180.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Paket	350,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20,098,800.00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Paket	25,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3,065,200.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Paket	4,300,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5,470,000.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	4 Laporan	6,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	567,807,000.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Laporan	700,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	135,448,200.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	-	210,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	10 Unit	1 Unit	12 Unit	79,556,500.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	15 Unit	150,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	10 Unit	1 Unit	2 Unit	55,891,700.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Unit	60,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100	100	100	100	379,615,220.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	100	375,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	181,813,220.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Laporan	175,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	197,802,000.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	12 Laporan	200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100	100	100	100	50,775,915.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	100	50,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2	2	2	2	36,185,800.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	2	35,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	20	20	120	14,590,115.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	ASN Disbudpar	20	15,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	2	2						2			
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah promosi seni budaya yang terlaksana					773,250,900.00					-		540,000,000.00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase event adat budaya yang terlaksana pada Calendar of Events	-			-	64,386,500.00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat	-	110,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

			Persentase SDM pelaku seni budaya yang mengikuti Bimtek														
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				3 Objek	69,967,300.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat			80,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				10	462,144,600.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat			150,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				10 Sertifikat	0.00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat			0.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengikutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase karya budaya yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda	-			-	176,752,500.00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat	-		200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

			Persentase karya budaya yang terdata dalam database DAPOBUD sebagai warisan budaya tak benda													
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				20 Objek	176,752,500.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat		200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	persentase kelompok seni budaya yang aktif					477,923,640.00						-	630,000,000.00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event seni budaya yang diikuti sesuai Kalender Event Luar Daerah	-			-	477,923,640.00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat	-	630,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Jumlah Kerjasama Event Seni													
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				500	152,333,900.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat		200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				40 Sertifikat	155,509,740.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat		200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				47 Lembaga	170,080,000.00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat		230,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						188,567,200.00					-		225,000,000.00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	20,950,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat	-	25,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				3 Objek	20,950,000.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat		25,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	persentase cagar budaya yang dipelihara sesuai dengan aslinya	-			-	167,617,200.00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat	-	200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				25 Objek	167,617,200.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Masyarakat		200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2,044,411,700.00							5,950,000,000.00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						2,044,411,700.00							5,950,000,000.00	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik (Attraction, Amenity, Accesibility)					1,333,784,400.00						-	4,500,000,000.00	

	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang terpelihara	-				-	291,744,600.00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	03. Peningk atan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Per dagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berk elanjutan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat	-	500,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Persentase Master Plan Destinasi Wisata yang menjadi DED														
			Persentase DED yang terealisasi														
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					2 Unit	291,744,600.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	03. Peningk atan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Per dagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berk elanjutan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat		500,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Atraksi di destiasi wisata	-			-	1,042,039,800.00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	03. Peningk atan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Per dagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berk elanjutan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat	-	4,000,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1,042,039,800.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	03. Peningk atan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Per dagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berk elanjutan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat		4,000,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kerjasama untuk pemasaran pariwisata daerah					408,578,750.00						-	600,000,000.00	

	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Dan Daya Tarik Wisata yang dipromosikan melalui sosial media	-				-	408,578,750.00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemanfaatan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan Pemenuhan konektivitas, pemanfaatan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyarakat	-	600,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Persentase event yang diikuti															
			Persentase kalender of event yang terlaksana															
			Tersedianya data dan informasi pariwisata yang berkualitas															
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Dokumen	181,186,650.00	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemanfaatan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan Pemenuhan konektivitas, pemanfaatan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyarakat		250,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	57,498,000.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemanfaatan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan Pemenuhan konektivitas, pemanfaatan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyarakat		100,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	126,207,500.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pempa ngunan Infr astruktur Dasar dan Perekonom ian Berbasis K ewilayahan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat		200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Promosi	43,686,600.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pempa ngunan Infr astruktur Dasar dan Perekonom ian Berbasis K ewilayahan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat		50,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pertumbuhan pelaku Ekonomi Kreatif					55,624,850.00						-	100,000,000.00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terdata	-			-	55,624,850.00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pempa ngunan Infr astruktur Dasar dan Perekonom ian Berbasis K ewilayahan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat	-	100,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				1 Dokumen	55,624,850.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusaha an, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pempa ngunan Infr astruktur Dasar dan Perekonom ian Berbasis K ewilayahan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat		100,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang terlatih					223,343,400.00						-	700,000,000.00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	persentase pelaku usaha pariwisata yang terbina	-			-	165,632,200.00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusaha an, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pempa ngunan Infr astruktur Dasar dan Perekonom ian Berbasis K ewilayahan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat	-	550,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Persentase Pokdarwis yang dibina													
			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina													
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				0 Laporan	0.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusaha an, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pempa ngunan Infr astruktur Dasar dan Perekonom ian Berbasis K ewilayahan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat		300,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				50 0	70,421,200.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemanfaatan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan Pemenuhan konektivitas, pemanfaatan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyarakat		100,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				50 Orang	95,211,000.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemanfaatan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan Pemenuhan konektivitas, pemanfaatan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyarakat		150,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bimbingan teknis bersertifikat	-			-	57,711,200.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemanfaatan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan Pemenuhan konektivitas, pemanfaatan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyarakat	-	150,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				20 Orang	57,711,200.00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pempa ngunan Infr astruktur Dasar dan Perekonom ian Berbasis K ewilayahan Pemenuha n konektivit as, pemban gunan sarana dan prasarana permukima n, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Masyara kat		150,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	J U M L A H							8,890,958,008.00							12,464,300,000.00	

BAB V

PENUTUP

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2026 adalah merupakan program-program lanjutan dari tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan riil dan program prioritas.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2026.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin maupun di lingkup daerah.



LAMPIRAN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

Kantor Inspektorat Kabupaten Tapin Jl. Brigjen H. Hasan Basry No.2 Telp. (0517) 31437

Fax. (0517) 32512, kode pos 71111 email disbudpartapin@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email disbudpartapin@gmail.com

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Selanjutnya sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin telah diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah tentang SPIP dan Peraturan Bupati tersebut secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tapin.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin

C. TUJUAN

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin

D. MANFAAT

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP.

3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.

E. RUANG LINGKUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin tahun 2025 ini meliputi tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis SKPD tahun 2024-2026 yaitu:

Tujuan

” Meningkatkan sektor pariwisata dan Meningkatkan Pelesterian Seni dan Budaya Lokal”

Sasaran

“ Meningkatkan Kualitas Pariwisata Daerah”

Dari sisi tingkatan manajemen, Rencana Tindak Pengendalian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2025 akan menjadi tanggung jawab tingkatan manajemen atas, manajemen menengah, dan manajemen bawah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.

F. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (*STATEMENT OF RESPONSIBILITIES*)

Dalam UU nomor 1 tahun 2004 (Pasal 55 ayat (4): Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang sudah diselenggarakan. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. Rencana tindak dalam penyelenggaraan SPIP tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

G. GAMBARAN SPIP

Dalam Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) wajib diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

1. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup:

- 1) Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara negara.
- 2) Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan.
- 3) Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan instansi tersebut.
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara.

2. Unsur-Unsur SPIP

SPIP wajib diselenggarakan untuk memberi keyakinan memadai bagi tercapainya empat tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dari perwujudan tujuan bernegara dan berbangsa. Pilar-pilar penyangga tersebut harus dibangun diatas fondasi unsur-unsur SPIP yang terdiri dari :

- 1) Penciptaan lingkungan pengendalian yang kuat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 s.d 12 PP Nomor 60 Tahun 2008.
- 2) Penilaian risiko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 s.d 17 PP Nomor 60 Tahun 2008 untuk dapat mengantisipasi atau mengelola risiko yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan.

- 3) Perancangan kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 s.d 40 PP 60 Tahun 2008 untuk mengamankan tiap proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
- 4) Penetapan mekanisme Informasi dan komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 s.d. 42 PP Nomor 60 Tahun 2008 sehingga dapat mengetahui dan mendeteksi secara dini setiap permasalahan yang dihadapi didalam berorganisasi untuk mencapai tujuan.
- 5) Pemantauan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 s.d. 46 PP Nomor 60 Tahun 2008.

Kegiatan penerapan unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan para pejabat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Tapin, paling tidak meliputi langkah-langkah berikut

- 1) Mengintegrasikan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok.
- 2) Melaksanakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses yang melekat dalam dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok.
- 3) Menerapkan unsur-unsur SPIP secara dinamis yaitu dilakukan penyempurnaan apabila terdapat risiko atau masalah yang diperkirakan akan menghambat pencapaian tujuan.

H. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

1. Rencana Tindak Lingkungan Pengendalian

Unsur Lingkungan Pengendalian adalah pondasi dalam pelaksanaan SPIP antara lain dalam bentuk penegakan integritas, kompetensi sumberdaya manusia, komitmen pimpinan. Terkait dengan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin dan risiko yang diidentifikasi, masih terdapat kelemahan untuk sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika, serta sub unsur Komitmen terhadap Kompetensi. Sebagai langkah untuk perbaikan, Rencana Tindak Lingkungan Pengendalian Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Uraian RTP
1	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana destinasi wisata sesuai kebutuhan

No	Sub Unsur	Uraian RTP
	destinasi wisata yang ada di daerah	
2	Terlaksananya Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Wisata sesuai Sapta Pesona
3	Terlaksananya Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif dan ditindaklanjuti
4	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Penerapan komitmen keselarasan program dan kegiatan
5	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata secara berkelanjutan dan ditindaklanjuti
6	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Bimtek Pelaku Ekonomi Kreatif dan ditindaklanjuti
7	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Membuat profil pariwisata Tapin secara keseluruhan dan mempromosikan melalui media massa atau media sosial lainnya
8	Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	calendar of Event yang sesuai kriteria
9	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan pemilihan duta wisata dan Puteri Puteri Pariwisata yang berkelanjutan
10	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pelaksanaan event pariwisata dan promosi pariwisata melalui media massa dan media sosial serta membuat konten pariwisata
11	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Bimtek Juru Pelihara cagar budaya yang berkelanjutan

No	Sub Unsur	Uraian RTP
	Pemajuan Kebudayaan	
12	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelaksanaan aruh adat yang terbuka untuk umum
13	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Bimtek sanggar seni budaya se Kabupaten Tapin
14	Tersedianya Pemberian Penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau ber kontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan.	Pemberian Penghargaan seni budaya untuk pelaku seni budaya yang berjasa untuk pemajuan seni budaya Kabupaten Tapin melalui penilaian dan berkelanjutan
15	Tersedianya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Pemberian jasa pemangku adat dayak
16	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pemberian jasa pemangku adat dayak
17	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kemitraan pariwisata	Event Seni budaya yang berkelanjutan
18	Terlaksananya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Workshop kesenian tradisional secara rutin dan berkelanjutan
19	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Pembinaan Lembaga/Group Seni Budaya se Kabupaten Tapin dan berkelanjutan
20	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Penerapan SOP Pendaftaran Benda yang diduga cagar budaya dan melakukan sosialisasi
21	Terlaksananya Pelindungan Cagar Budaya	Penerapan SOP pengelolaan cagar budaya dan melakukan sosialisasi

2. Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko

Hasil analisis risiko atas tujuan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin dan tujuan operasional kegiatan menyimpulkan, terdapat 16 (enam belas) risiko atas tujuan operasional pada tingkat kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapin yang selanjutnya akan menjadi prioritas dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2025, sebagai berikut:

No	Risiko	Uraian RTP
1	Tidak semua destinasi wisata bisa terfasilitasi sarana dan prasarananya dan pengelolaannya	Pengadaan sarana dan prasarana destinasi wisata
2	Tidak semua destinasi wisata bisa terfasilitasi sarana dan prasarananya dan pengelolaannya	Pengelolaan Destinasi Wisata oleh Petugas pengelola
3	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi kreatif	Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif
4	Rendahnya koordinasi antar dinas, lembaga dan pelaku usaha pariwisata dan ekokraf lainnya dalam pengembangan pembangunan pariwisata di daerah	Bimtek bagi pelaku usaha pariwisata, hotel, cafe dan rumah makan
5	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
6	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi kreatif	Bimtek bagi pelaku ekonomi kreatif
7	Minimnya data pariwisata yang tersedia dan kurangnya penyebaran informasi pariwisata	Website Disbudapar
8	Kurangnya komitmen kerjasama dengan dinas terkait, CSR dan media promosi	Peluncuran Calender of Event
9	Minimnya fasilitas kegiatan pemasaran	Kegiatan pemilihan duta wisata dan Puteri Puteri Pariwisata
10	Rendahnya destinasi pariwisata yang dipasarkan	Pemasaran pariwisata melalui event dan promosi melalui media massa dan media sosial
11	Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya	Bimtek Juru Pelihara cagar budaya
12	Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap tradisi budaya	Pelaksanaan aruh adat

No	Risiko	Uraian RTP
13	Rendahnya apresiasi terhadap pengetahuan tradisional	Bimtek sanggar seni budaya
14	Rendahnya apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya	Pemberian Penghargaan seni budaya untuk pelaku seni budaya yang berjasa untuk pemajuan seni budaya Kabupaten Tapin
15	pembinaan yang tidak efektif dan tidak relevan	Pembinaan pemangku adat dayak
16	Rendahnya kegiatan adat budaya daerah	Pembinaan pemangku adat dayak
17	Kurangnya pemahaman akan pentingnya kelestarian kesenian tradisional	Penampilan group/sanggar budaya pada peringatan hari besar nasional
18	Kurangnya kesadaran akan pentingnya standarisasi bagi SDM Kesenian Tradisional	Workshop seni budaya bagi pelaku seni budaya
19	Lembaga kesenian tradisional yang tidak dikelola dan tidak berkembang	Pembinaan group seni budaya di beberapa Kecamatan
20	Rendahnya Jumlah Cagar Budaya yang masuk dalam Warisan Budaya RI	SOP Pendaftaran Benda yang diduga cagar budaya
21	Rendahnya Cagar Budaya yang dilindungi	SOP pengelolaan cagar budaya

Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RTP dan target waktu pelaksanaan ada pada lampiran 1.

I. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan RTP ini adalah informasi yang dapat memberikan keyakinan kepada pemilik risiko bahwa pengendalian telah berjalan dengan efektif. Daftar informasi dan komunikasi sebagai pelaksanaan RTP dapat dilihat pada lampiran 1.

J. PEMANTAUAN

Pemantauan bertujuan untuk meyakinkan bahwa RTP serta informasi dan komunikasi dilaksanakan sesuai rencana dan sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan. Pemantauan dilakukan dalam bentuk:

1. *On Going Monitoring* adalah pemantauan yang melekat dalam proses pelaksanaan tugas pokok dilakukan secara kontinyu oleh atasan langsung.

2. Pemantauan terpisah secara berkala akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin.

Daftar pemantauan ada pada lampiran 1

K. PENUTUP

1. Dokumen RTP ini akan menjadi dokumen hidup yang senantiasa akan disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi untuk perbaikan SPIP secara berkelanjutan di Pemerintah Kabupaten Tapin.
2. Dokumen RTP berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 8 Januari 2025

Kepala Dinas,



Drs. Hamdan Rosyadie, M.Si

NIP. 19700119 199010 1 001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tapin		
Periode yang dinilai	: 2025		
OPD yang Dinilai	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
Pemilik Risiko	: Kepala Dinas (Strategis) dan Kepala Bidang/Seksi (Operasional)		
: Sumber Data	Renstra, Renja, Perkin, dan lain lain		
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya PAD Usaha pariwisata		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Kualitas Pariwisata Daerah 2. Meningkatkan Pelestarian Budaya		
IKU Strategis	Uraian Indikator		Satuan
	1. Meningkatnya Kualitas Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	Jam
		Rata-rata belanja wisatawan	Rp
	2. Meningkatkan Pelestarian Budaya	persentase cagar budaya yang ditetapkan	%
		Persentase objek pemajuan kebudayaan yang	%
Nama Program dan Kegiatan Utama	A. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	A.1 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
	A.1.1. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
	A.2 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
	A.2.1. Sub Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
	B. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	B.1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan		
	B.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		
	B.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi		
	B.1.3. Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan		
	B.2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
	B.2.1. Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		
	C. Program Pemasaran Pariwisata		
	C.1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik		
	C.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota,		
	C.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		
	C.1.3 Sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
	C.1.4 Sub kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya		
	D. Program Pengembangan Kebudayaan		
	D.1 Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah		
	D.1.1 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
	D.2. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
	D.2.1 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi		
	D.2.2 Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		
	D.2.3 Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		
	D.3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah		
	D.3.1 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga		
	D.4 Program Pengembangan Kesenian Tradisional		
	D.4.1 Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah		
	D.4.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		

	D.4.1.2 Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
	D.4.1.3 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan	D.5 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
	D.5.1 Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
	D.5.1.1 Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
	D.5.1 Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
	D.5.2.1 Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	
	Uraian Indikator Keluaran	Satuan
	A.	
	A.1	
	A.1.1. Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Buah
	A.2	
	A.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Buah
	B.	
	B.1.	
	B.1.1. Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Orang
	B.1.2 Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang
	B.1.3. Jumlah Orang yang mengikuti Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Orang
	B.2.	
	B.2.1. Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan	Orang
	C.	
	C.1.	
	C.1.1 Jumlah dokumen Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen
	C.1.2 Jumlah Laporan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Laporan
	C.1.3 Jumlah laporan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan
	C.1.4 Jumlah dokumen Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen
	D.	
	D.1	
	D.1.1 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek
	D.2.	
	D.2.1 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek
	D.2.2 Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga	Orang
	D.2.3 Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Orang
	D.3.	
	D.3.1 Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek
	D.4	
	D.4.1	
	D.4.1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang
	D.4.1.2 Jumlah SDM Kesenian Tradisional yang mengikuti Standardisasi Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Orang
	D.4.1.3 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang dilakukan Peningkatan Kapasitas	Lembaga
	D.5	
	D.5.1	
	D.5.1.1 Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek
	D.5.2.	

D.5.2.1 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek
Kabupaten Tapin, 8 Januari 2025 Kepala Dinas,  Drs. Hamdan Rosvadie, M.Si 19700119 199010 1 001	

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis dan Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tapin
 Nama OPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Periode yang dinilai : 2025
 Tujuan Strategis : Meningkatkan PAD Usaha pariwisata
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Kualitas Pariwisata Daerah
 : Meningkatkan Pelestarian Budaya

No	Penetapan Konteks				Risiko		Sebab*)		Dampak**)	
	Sastra/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Indikator	Proses Bisnis/Tahap	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	SASTRA 1- Meningkatnya Sektor Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Hasil rekapitulasi data kunjungan wisman dan wisnus tahun 2023 dan tahun 2024			Kepala Disbudpar			
			Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (jam)	Hasil Kajian rata-rata lama tinggal wisatawan			Kepala Disbudpar			
			Rata-Rata Belanja Wisatawan (rupiah)	Hasil Kajian rata-rata belanja wisatawan			Kepala Disbudpar			
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata	persentase sarana dan prasarana yang tersedia pada destinasi wisata	Pemantauan, Pembuatan SOP Destinasi Wisata yang sesuai Sapta Pesona			Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan ekokraf			
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Meningkatnya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemenuhan Destinasi Parawisata sesuai Sapta Pesona	Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang terpelihara	Pemantauan, Pembuatan SOP Destinasi Wisata yang sesuai Sapta Pesona			Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan ekokraf			
1	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpenuhi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.1	Tidak semua destinasi wisata bisa terfasilitasi sarana dan prasarananya dan pengelolaannya	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan ekokraf	SDM kurang memadai, tidak cukup anggaran dan waktu.	Eksternal/Internal	Fasilitasi sarana dan prasarana destinasi wisata yang masih kurang
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemenuhan Destinasi Parawisata sesuai Sapta Pesona	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Pemantauan, Pembuatan SOP Desa Wisata			Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan ekokraf			
2	Sub Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.02	Tidak semua destinasi wisata bisa terfasilitasi sarana dan prasarananya dan pengelolaannya	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan ekokraf	SDM kurang memadai, tidak cukup anggaran dan waktu.	Eksternal/Internal	petugas pengelola yang kurang aktif
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Persentase Pertumbuhan pelaku Ekonomi Kreatif	Pemantauan, SOP Pendataan Pelaku Ekokraf			Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan ekokraf			
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	Pemantauan, SOP Pendataan Pelaku Ekokraf			Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan ekokraf			
			persentase pelaku usaha pariwisata yang terbina	Pemantauan, rekapitulasi hasil TDUP			Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan ekokraf			

			Persentase Pokdarwis yang dibina	Pemantauan, SOP Pembentukan Pokdarwis			Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan ekokraf			
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terpenuhinya SDM Pariwisata dan Ekokraf yang kompeten	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.03	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi kreatif	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan ekokraf	Kurangnya sosialisasi dan Pelaku ekonomi kreatif yang kurang aktif	Eksternal/Internal	Pelaku ekonomi kreatif yang tidak variatif dalam mengolah produknya
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terpenuhinya SDM Pariwisata dan Ekokraf yang kompeten	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.04	Rendahnya koordinasi antar dinas, lembaga dan pelaku usaha pariwisata dan ekokraf lainnya dalam pengembangan pembangunan pariwisata di daerah	Bidang Kemitraan, Jasa dan Pemasaran Pariwisata	Kurangnya keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan antar pelaku usaha pariwisata	Eksternal/Internal	Belum adanya komitmen pelaku usaha pariwisata dalam mengembangkan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
5	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Terpenuhinya SDM Pariwisata dan Ekokraf yang kompeten	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.05	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan ekokraf	Kurangnya sosialisasi dan Pokdarwis yang kurang aktif	Eksternal/Internal	Pokdarwis yang tidak kompeten
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	Pemantauan, SOP Pendataan Pelaku Ekokraf						
6	Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terpenuhinya SDM Pariwisata dan Ekokraf yang kompeten	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.06	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi kreatif	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan ekokraf	Pelaku ekonomi kreatif yang kurang aktif	Eksternal/Internal	berkurangnya Jumlah Pelaku ekonomi kreatif
	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase kerjasama untuk pemasaran pariwisata daerah sesuai yang ditargetkan	Pemantauan, kerjasama dengan media sosial, PHRI dalam rangka memasarkan pariwisata						
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya promosi dan pemasaran pariwisata	Persentase Destinasi Dan Daya Tarik Wisata yang dipromosikan melalui sosial media	Pemantauan, promosi melalui media sosial						
			Persentase event yang diikuti	Pemantauan, mengikuti event baik di dalam dan luar daerah						
			Persentase kalender of event yang terlaksana	Pemantauan, Melakukan Rakoor dan kerjasama antar instansi dan CSR dalam menentukan Calender of Event						
7	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terpenuhinya data promosi dan pemasaran pariwisata	Jumlah dokumen Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.07	Minimnya data pariwisata yang tersedia dan kurangnya penyebaran informasi pariwisata	Bidang Kemitraan, Jasa dan Pemasaran Pariwisata	Kurangnya koordinasi dalam penyusunan data, kurangnya SDM dan anggaran.	Eksternal/Internal	Pengolahan data pariwisata yang belum maksimal dan kurangnya pemasaran /promosi pariwisata
8	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terpenuhinya data promosi dan pemasaran pariwisata	Jumlah Laporan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.08	Kurangnya komitmen kerjasama dengan dinas terkait, CSR dan media promosi	Bidang Kemitraan, Jasa dan Pemasaran Pariwisata	keterbatasan anggaran dan waktu yang terbatas	Eksternal/Internal	Kurangnya promosi pariwisata

9	Sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpenuhinya data promosi dan pemasaran pariwisata	Jumlah laporan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.09	Minimnya fasilitas kegiatan pemasaran	Bidang Kemitraan, Jasa dan Pemasaran Pariwisata	SDM kurang memadai, tidak cukup anggaran dan waktu.	Eksternal/Internal	Kurangnya alat bahan promosi pariwisata
10	Sub kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terpenuhinya promosi dan pemasaran pariwisata Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.10	Rendahnya destinasi pariwisata yang dipasarkan	Bidang Kemitraan, Jasa dan Pemasaran Pariwisata	Kurangnya pembuatan konten destinasi wisata	Eksternal/Internal	Kurangnya promosi di media massa dan media sosial
	Program: Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah	persentase seni budaya yang dimanfaatkan							
			persentase budaya yang dimanfaatkan							
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase event adat budaya yang terlaksana pada Calendar of Events							
			persentase event adat budaya yang masuk CoE							
11	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terpenuhinya data objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek data objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.011	Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya	Bidang Kebudayaan	Kurangnya sosialisasi dan kurangnya minat masyarakat terhadap objek budaya	Eksternal/Internal	hilangnya atau terdistorsi-nya nilai-nilai budaya asli
	Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	persentase kelembagaan seni budaya yang dibina							
			persentase sanggar seni budaya yang mendapatkan pelatihan							
12	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terpenuhinya data objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.012	Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap tradisi budaya	Bidang Kebudayaan	Kurangnya sosialisasi dan kurangnya minat masyarakat terhadap tradisi budaya	Eksternal/Internal	Hilangnya Autentisitas atau keaslian Tradisi
13	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terpenuhinya dataSDM , Lembaga dan Parnata Tradisional	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.013	Rendahnya apresiasasi terhadap pengetahuan tardisional	Bidang Kebudayaan	Kurangnya sosialisasi dan kurangnya minat masyarakat terhadap pengetahuan tradisional	Eksternal/Internal	hilangnya pengetahuan dan keterampilan tradisional yang diwariskan turun-temurun
14	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan.	Terpenuhinya data orang/lembaga yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.014	Rendahnya apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya	Bidang Kebudayaan	Terbatasnya anggaran membuat pemberian tidak berkelanjutan	Eksternal/Internal	makin berkurangnya jumlah pelaku seni dan budayawan dan tidak ada penrusnya
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pembinaan sejarah nilai tradisional dan sastra	Persentase Pemangku Adat Dayak yang Aktif							

15	Sub KegiatanPembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Terpenuhinya data SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.015	pembinaan yang tidak efektif dan tidak relevan	Bidang Kebudayaan	keterbatasan anggaran atau pendanaan yang tidak mencukupi	Eksternal/Internal	pembinaan terhenti atau terabaikan, serta mengurangi kapasitas lembaga dan pranata untuk berkembang
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pembinaan sejarah nilai tradisional dan sastra	Persentase karya budaya yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda							
			Persentase karya budaya yang terdata dalam database DAPOBUD sebagai warisan budaya tak benda							
16	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terpenuhinya data objek pemajuan lembaga adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yangTelah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.016	Rendahnya kegiatan adat budaya daerah	Bidang Kebudayaan	kurangnya sosialisasi dan keterbatasan anggaran atau pendanaan yang tidak mencukupi	Eksternal/Internal	nilai-nilai dan identitas asli lembaga adat akan tergerus atau hilang karena tekanan modernisasi atau perubahan
	Program: Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah	persentase kelembagaan seni budaya yang dibina							
			persentase kelembagaan seni budaya yang dikembangkan							
	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Kesenian Daerah	persentase event seni budaya yang terlaksana pada Calendar of Events Daerah							
			Persentase event seni budaya yang diikuti sesuai Kalender Event Luar Daerah							
			persentase sanggar seni budaya yang tampil sesuai kriteria							
17	Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisiona	Terpenuhinya data SDM Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.017	Kurangnya pemahaman akan pentingnya kelestarian kesenian tradisional	Bidang kesenian	Kurangnya minat generasi muda terhadap seni tradisional dan keterbatasan anggaran	Eksternal/Internal	SDM Kesenian tradisional yang semakin langka
18	Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Terpenuhinya data Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah SDM Kesenian Tradisional yang mengikuti Standardisasi Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.018	Kurangnya kesadaran akan pentingnya standarisasi bagi SDM Kesenian Tradisional	Bidang kesenian	penciptaan standar yang terlalu kaku yang tidak menghargai variasi atau kekayaan budaya yang ada di berbagai daerah, serta mengurangi ekspresi lokal	Eksternal/Internal	SDM Kesenian tidak sesuai standart
19	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terpenuhinya data Lembaga Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang dilakukan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.019	Lembaga kesenian tradisional yang tidak dikelola dan tidak berkembang	Bidang kesenian	Ketidakmampuan Lembaga dalam Beradaptasi dengan Perubahan Zaman	Eksternal/Internal	Lembaga kesnian tidak mampu mengelola tantangan baru yang muncul dalam dunia kesenian yang terus berkembang
	Program: Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya pelestarian dan perlindungan benda cagar budaya/situs daerah	persentase cagar budaya yang dilindungi							
			persentase warisan budaya takbenda yang dilindungi							
	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya pendaftaran dan pemeliharaan Cagar Budaya	persentase peningkatan cagar budaya yang didaftarkan							
20	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terpenuhinya Data dan Informasi Perlindungan dan Konservasi Cagar Budaya yang sesuai standar	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Pelaksanaan	ROO.Disbudpar.020	Rendahnya Jumlah Cagar Budaya yang masuk dalam Warisan Budaya RI	Bidang Kebudayaan	Keterbatasan data yang akurat dan lengkap dan tidak ada tim ahli tingkat kabupaten	Eksternal/Internal	objek yang layak mendapat perlindungan tidak terdaftar

[illegible]

KERTAS KERJA ANALISIS RISIKO

No	Risiko	Kode Risiko	Responden 1		Responden 2		Responden 3		Responden 4		Responden 5		Rata-rata		Pembulatan		Skala Risiko (Dampak x Kemungkinan)
			Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	
1	Tidak semua destinasi wisata bisa terfasilitasi sarana dan prasarannya dan pengelolaannya	ROO.Disbudpar.01	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3,20	3,00	3,00	3,00	9,00
2	Tidak semua destinasi wisata bisa terfasilitasi sarana dan prasarannya dan pengelolaannya	ROO.Disbudpar.02	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2,20	2,80	2,00	3,00	6,00
3	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi kreatif	ROO.Disbudpar.03	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2,60	2,60	3,00	3,00	9,00
4	Rendahnya koordinasi antar dinas, lembaga dan pelaku usaha pariwisata dan ekokraf lainnya dalam pengembangan pembangunan pariwisata di daerah	ROO.Disbudpar.04	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1,80	1,20	2,00	1,00	2,00
5	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan	ROO.Disbudpar.05	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1,60	1,80	2,00	2,00	4,00
6	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi kreatif	ROO.Disbudpar.06	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1,60	1,60	2,00	2,00	4,00
7	Minimnya data pariwisata yang tersedia dan kurangnya penyebaran informasi pariwisata	ROO.Disbudpar.07	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1,20	1,60	1,00	2,00	2,00
8	Kurangnya komitmen kerjasama dengan dinas terkait, CSR dan media promosi	ROO.Disbudpar.08	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2,00	1,40	2,00	1,00	2,00
9	Minimnya fasilitas kegiatan pemasaran	ROO.Disbudpar.09	2	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1,20	2,20	1,00	2,00	2,00
10	Rendahnya destinasi pariwisata yang dipasarkan	ROO.Disbudpar.10	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1,60	1,60	2,00	2,00	4,00
11	Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya	ROO.Disbudpar.011	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1,80	1,20	2,00	1,00	2,00
12	Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap tradisi budaya	ROO.Disbudpar.012	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1,60	1,80	2,00	2,00	4,00
13	Rendahnya apresiasi terhadap pengetahuan tradisional	ROO.Disbudpar.013	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1,60	1,60	2,00	2,00	4,00
14	Rendahnya apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya	ROO.Disbudpar.014	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1,20	1,60	1,00	2,00	2,00
15	pembinaan yang tidak efektif dan tidak relevan	ROO.Disbudpar.015	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2,00	1,40	2,00	1,00	2,00
16	Rendahnya kegiatan adat budaya daerah	ROO.Disbudpar.016	2	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1,20	2,20	1,00	2,00	2,00
17	Kurangnya pemahaman akan pentingnya kelestarian kesenian tradisional	ROO.Disbudpar.017	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1,60	1,60	2,00	2,00	4,00
18	Kurangnya kesadaran akan pentingnya standarisasi bagi SDM Kesenian Tradisional	ROO.Disbudpar.018	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1,20	1,60	1,00	2,00	2,00
19	Lembaga kesenian tradisional yang tidak dikelola dan tidak berkembang	ROO.Disbudpar.019	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2,00	1,40	2,00	1,00	2,00
20	Rendahnya Jumlah Cagar Budaya yang masuk dalam Warisan Budaya RI	ROO.Disbudpar.020	2	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1,20	2,20	1,00	2,00	2,00
21	Rendahnya Cagar Budaya yang dilindungi	ROO.Disbudpar.021	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1,60	1,60	2,00	2,00	4,00

MATRIKS ANALISIS RISIKO

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Sangat signifikan
			1	2	3	4
	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3			ROO.Disbudpar.01 ROO.Disbudpar.03	
	Kemungkinan kecil	2		ROO.DPMD.04 ROO.DPMD.05 ROO.DPMD.06 ROO.DPMD.07 ROO.DPMD.08 ROO.DPMD.09 ROO.DPMD.10 ROO.DPMD.11 ROO.DPMD.12 ROO.DPMD.13 ROO.DPMD.14 ROO.DPMD.15 ROO.DPMD.16 ROO.DPMD.16 ROO.DPMD.17 ROO.DPMD.18 ROO.DPMD.19 ROO.DPMD.20 ROO.DPMD.21	ROO.Disbudpar.02	
	Sangat jarang	1				
Keterangan :			Rendah	Risiko dapat diterima		
			Sedang dan Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya		
			Sangat Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas		

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tapin
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatnya PAD Usaha pariwisata
Sasaran strategis OPD	: Meningkatnya Kualitas Pariwisata Daerah
	: Meningkatkan Pelestarian Budaya
Urusan Pemerintahan	: Kebudayaan dan Pariwisata

Catatan : Risiko Prioritas diambil dari Matrik Risiko, yang perlu untuk dilakukan pengendalian dan diturunkan skor risikonya

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Tidak semua destinasi wisata bisa terfasilitasi sarana dan prasarananya dan pengelolaannya	ROO.Disbudpar.01	9,00	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekokraf	SDM kurang memadai, tidak cukup anggaran dan waktu.	Fasilitasi sarana dan prasarana destinasi wisata yang masih kurang
2	Tidak semua destinasi wisata bisa terfasilitasi sarana dan prasarananya dan pengelolaannya	ROO.Disbudpar.02	6,00	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekokraf	SDM kurang memadai, tidak cukup anggaran dan waktu.	petugas pengelola yang kurang aktif
3	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi kreatif	ROO.Disbudpar.03	9,00	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekokraf	Kurangnya sosialisasi dan Pelaku ekonomi kreatif yang kurang aktif	Pelaku ekonomi kreatif yang tidak variatif dalam mengolah produknya
4	Rendahnya koordinasi antar dinas, lembaga dan pelaku usaha pariwisata dan ekokraf lainnya dalam pengembangan pembangunan pariwisata di daerah	ROO.Disbudpar.04	2,00	Bidang Kemitraan Jasa dan Pemasaran Pariwisata	Kurangnya keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan antar pelaku usaha pariwisata	Belum adanya komitmen pelaku usaha pariwisata dalam mengembangkan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif

5	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan	ROO.Disbudpar.05	4,00	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekokraf	Kurangnya sosialisasi dan Pokdarwis yang kurang aktif	Pokdarwis yang tidak kompeten
6	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi kreatif	ROO.Disbudpar.06	4,00	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekokraf	Pelaku ekonomi kreatif yang kurang aktif	berkurangnya Jumlah Pelaku ekonomi kreatif
7	Minimnya data pariwisata yang tersedia dan kurangnya penyebaran informasi pariwisata	ROO.Disbudpar.07	2,00	Bidang Kemitraan Jasa dan Pemasaran Pariwisata	Kurangnya koordinasi dalam penyusunan data, kurangnya SDM dan anggaran.	Pengolahan data pariwisata yang belum maksimal dan kurangnya pemasaran /promosi pariwisata
8	Kurangnya komitmen kerjasama dengan dinas terkait, CSR dan media promosi	ROO.Disbudpar.08	2,00	Bidang Kemitraan Jasa dan Pemasaran Pariwisata	keterbatasan anggaran dan waktu yang terbatas	Kurangnya promosi pariwisata
9	Minimnya fasilitas kegiatan pemasaran	ROO.Disbudpar.09	2,00	Bidang Kemitraan Jasa dan Pemasaran Pariwisata	SDM kurang memadai, tidak cukup anggaran dan waktu.	Kurangnya alat bahan promosi pariwisata
10	Rendahnya destinasi pariwisata yang dipasarkan	ROO.Disbudpar.10	4,00	Bidang Kemitraan Jasa dan Pemasaran Pariwisata	Kurangnya pembuatan konten destinasi wisata	Kurangnya promosi di media massa dan media sosial
11	Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya	ROO.Disbudpar.01 1	2,00	Bidang Kebudayaan	Kurangnya sosialisasi dan kurangnya minat masyarakat terhadap objek budaya	hilangnya atau terdistorsi-nya nilai-nilai budaya asli

12	Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap tradisi budaya	ROO.Disbudpar.01 2	4,00	Bidang Kebudayaan	Kurangnya sosialisasi dan kurangnya minat masyarakat terhadap tradisi budaya	Hilangnya Autentisitas atau keaslian Tradisi
13	Rendahnya apresiasi terhadap pengetahuan tradisional	ROO.Disbudpar.01 3	4,00	Bidang Kebudayaan	Kurangnya sosialisasi dan kurangnya minat masyarakat terhadap pengetahuan tradisional	hilangnya pengetahuan dan keterampilan tradisional yang diwariskan turun-temurun
14	Rendahnya apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya	ROO.Disbudpar.01 4	2,00	Bidang Kebudayaan	Terbatasnya anggaran membuat pemberian tidak berkelanjutan	makin berkurangnya jumlah pelaku seni dan budayawan dan tidak ada penrusnya
15	pembinaan yang tidak efektif dan tidak relevan	ROO.Disbudpar.01 5	2,00	Bidang Kebudayaan	keterbatasan anggaran atau pendanaan yang tidak mencukupi	pembinaan terhenti atau terabaikan, serta mengurangi kapasitas lembaga dan pranata untuk berkembang
16	Rendahnya kegiatan adat budaya daerah	ROO.Disbudpar.01 6	2,00	Bidang Kebudayaan	kurangnya sosialisasi dan keterbatasan anggaran atau pendanaan yang tidak mencukupi	nilai-nilai dan identitas asli lembaga adat akan tergerus atau hilang karena tekanan modernisasi atau perubahan sosial yang tidak memperhatikan keaslian dan kearifan lokal
17	Kurangnya pemahaman akan pentingnya kelestarian kesenian tradisional	ROO.Disbudpar.01 7	4,00	Bidang kesenian	Kurangnya minat generasi muda terhadap seni tradisional dan keterbatasan anggaran	SDM Kesenian tradisional yang semakin langka
18	Kurangnya kesadaran akan pentingnya standarisasi bagi SDM Kesenian Tradisional	ROO.Disbudpar.01 8	2,00	Bidang kesenian	penciptaan standar yang terlalu kaku yang tidak menghargai variasi atau kekayaan budaya yang ada di berbagai daerah, serta mengurangi ekspresi lokal yang unik	SDM Kesenian tidak sesuai standart
19	Lembaga kesenian tradisional yang tidak dikelola dan tidak berkembang	ROO.Disbudpar.01 9	2,00	Bidang kesenian	Ketidakmampuan Lembaga dalam Beradaptasi dengan Perubahan Zaman	Lembaga kesnian tidak mampu mengelola tantangan baru yang muncul dalam dunia kesenian yang terus berkembang
20	Rendahnya Jumlah Cagar Budaya yang masuk dalam Warisan Budaya RI	ROO.Disbudpar.02 0	2,00	Bidang Kebudayaan	Keterbatasan data yang akurat dan lengkap dan tidak ada tim ahli tingkat kabupaten	objek yang layak mendapat perlindungan tidak terdaftar

21	Rendahnya Cagar Budaya yang dilindungi	ROO.Disbudpar.021	4,00	Bidang Kebudayaan	sumber daya yang cukup, baik dari segi dana, tenaga ahli, maupun fasilitas. Jika pemerintah atau lembaga terkait tidak dapat menyediakan sumber daya yang memadai, perlindungan terhadap cagar budaya akan terganggu atau tidak maksimal.	Cagar Budaya yang layak mendapatkan perlindungan tidak terlindungi
----	--	-------------------	------	-------------------	---	--

Catatan :

Risiko Prioritas hanya diisi yang diatas Selera Risiko atau yang akan dibuat RTPnya

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Tapin					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya PAD Usaha pariwisata					
Sasaran strategis OPD		: Meningkatnya Kualitas Pariwisata Daerah					
		: Meningkatnya Pelestarian Budaya					
Urusan Pemerintahan		: Kebudayaan dan Pariwisata					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tidak semua destinasi wisata bisa terfasilitasi sarana dan prasarannya dan pengelolaannya	ROO.Disbud par.01	Pengadaan sarana dan prasarana destinasi wisata	Belum semua destinasi wisata memiliki sarana dan prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana destinasi wisata sesuai kebutuhan	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekokraf	Desember 2025
2	Tidak semua destinasi wisata bisa terfasilitasi sarana dan prasarannya dan pengelolaannya	ROO.Disbud par.02	Pengelolaan Destinasi Wisata oleh Petugas pengelola	Tidak semua Petugas Pengelola aktif dalam pengelolaannya	Pengelolaan Destinasi Wisata sesuai Sapta Pesona	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekokraf	Desember 2025
3	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi kreatif	ROO.Disbud par.03	Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Belum semua Pelaku Ekonomi Kreatif mendapatkan Pembinaan	Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif dan ditindaklanjuti	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekokraf	Desember 2025
4	Rendahnya koordinasi antar dinas, lembaga dan pelaku usaha pariwisata dan ekokraf lainnya dalam pengembangan pembangunan pariwisata di daerah	ROO.Disbud par.04	Bimtek bagi pelaku usaha pariwisata, hotel, cafe dan rumah makan	Belum semua pelaku usaha pariwisata mendapatkan bimtek tata kelola usaha pariwisata	Penerapan komitmen keselarasan program dan kegiatan	Bidang Kemitraan Jasa dan Pemasaran Pariwisata	Desember 2025
5	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan	ROO.Disbud par.05	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Belum semua Pokdarwis mendapatkan Pelatihan	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata secara berkelanjutan dan ditindaklanjuti	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekokraf	Desember 2025
6	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi kreatif	ROO.Disbud par.06	Bimtek bagi pelaku ekonomi kreatif	Belum semua Pelaku Ekonomi Kreatif mendapatkan Bimtek	Bimtek Pelaku Ekonomi Kreatif dan ditindaklanjuti	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekokraf	Desember 2025
7	Minimnya data pariwisata yang tersedia dan kurangnya penyebaran informasi pariwisata	ROO.Disbud par.07	Website Disbudapar	Informasi Kepariwisata secara up date	Membuat profil pariwisata Tapin secara keseluruhan dan mempromosikan melalui media massa atau media sosial lainnya	Bidang Kemitraan Jasa dan Pemasaran Pariwisata	Desember 2025
8	Kurangnya komitmen kerjasama dengan dinas terkait, CSR dan media promosi	ROO.Disbud par.08	Peluncuran Calender of Event	Belum semua calender of Event terlaksana	calender of Event yang sesuai kriteria	Bidang Kemitraan Jasa dan Pemasaran Pariwisata	Desember 2025
9	Minimnya fasilitas kegiatan pemasaran	ROO.Disbud par.09	Kegiatan pemilihan duta wisata dan Puteri Puteri Pariwisata	Pemilihan duta wisata dan Puteri Puteri Pariwisata dilaksanakan setiap 2 tahun sekali	Kegiatan pemilihan duta wisata dan Puteri Puteri Pariwisata yang berkelanjutan	Bidang Kemitraan Jasa dan Pemasaran Pariwisata	Desember 2025
10	Rendahnya destinasi pariwisata yang dipasarkan	ROO.Disbud par.10	Pemasaran pariwisata melalui event dan promosi melalui media massa dan media sosial	Tidak semua event bisa dilaksanakan dan diikuti dan tidak semua destinasi wisata mempunyai video konten pariwisata	Pelaksanaan event pariwisata dan promosi pariwisata melalui media massa dan media sosial serta membuat konten pariwisata	Bidang Kemitraan Jasa dan Pemasaran Pariwisata	Desember 2025
11	Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya	ROO.Disbud par.011	Bimtek Juru Pelihara cagar budaya	Belum semua juru pelihara BCB mendapatkan bimtek	Bimtek Juru Pelihara cagar budaya yang berkelanjutan	Bidang Kebudayaan	Desember 2025
12	Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap tradisi budaya	ROO.Disbud par.012	Pelaksanaan aruh adat	Banyak masyarakat yang tidak mengetahui aruh adat dayak	Pelaksanaan aruh adat yang terbuka untuk umum	Bidang Kebudayaan	Desember 2025

13	Rendahnya apresiasi terhadap pengetahuan tradisional	ROO.Disbud par.013	Bimtek sanggar seni budaya	Tidak semua sanggar seni budaya mengikuti bimtek	Bimtek sanggar seni budaya se Kabupaten Tapin	Bidang Kebudayaan	Desember 2025
14	Rendahnya apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya	ROO.Disbud par.014	Pemberian Penghargaan seni budaya untuk pelaku seni budaya yang berjasa untuk kemajuan seni budaya Kabupaten Tapin	Tidak semua pelaku seni budaya mendapatkan penghargaan	Pemberian Penghargaan seni budaya untuk pelaku seni budaya yang berjasa untuk kemajuan seni budaya Kabupaten Tapin melalui penilaian dan berkelanjutan	Bidang Kebudayaan	Desember 2025
15	pembinaan yang tidak efektif dan tidak relevan	ROO.Disbud par.015	Pembinaan pemangku adat dayak	Pembinaan masyarakat adat dayak	Pemberian jasa pemangku adat dayak	Bidang Kebudayaan	Desember 2025
16	Rendahnya kegiatan adat budaya daerah	ROO.Disbud par.016	Pembinaan pemangku adat dayak	Pembinaan masyarakat adat dayak	Pemberian jasa pemangku adat dayak	Bidang Kebudayaan	Desember 2025
17	Kurangnya pemahaman akan pentingnya kelestarian kesenian tradisional	ROO.Disbud par.017	Penampilan group/sanggar budaya pada peringatan hari besar nasional	Tidak semua sanggar seni budaya ditampilkan pada kegiatan daerah	Event Seni budaya yang berkelanjutan	Bidang kesenian	Desember 2025
18	Kurangnya kesadaran akan pentingnya standarisasi bagi SDM Kesenian Tradisional	ROO.Disbud par.018	Workshop seni budaya bagi pelaku seni budaya	Tidak semua pelaku seni budaya mendapatkan workshop seni budaya	Workshop kesenian tradisional secara rutin dan berkelanjutan	Bidang kesenian	Desember 2025
19	Lembaga kesenian tradisional yang tidak dikelola dan tidak berkembang	ROO.Disbud par.019	Pembinaan group seni budaya di beberapa Kecamatan	Tidak semua group seni budaya mendapatkan pembinaan	Pembinaan Lembaga/Group Seni Budaya se Kabupaten Tapin dan berkelanjutan	Bidang kesenian	Desember 2025
20	Rendahnya Jumlah Cagar Budaya yang masuk dalam Warisan Budaya RI	ROO.Disbud par.020	SOP Pendaftaran Benda yang diduga cagar budaya	Banyak masyarakat yang tidak mengetahui SOP Pendaftaran Cagar Budaya	Penerapan SOP Pendaftaran Benda yang diduga cagar budaya dan melakukan sosialisasi	Bidang Kebudayaan	Desember 2025
21	Rendahnya Cagar Budaya yang dilindungi	ROO.Disbud par.021	SOP pengelolaan cagar budaya	Banyak masyarakat yang tidak mengetahui SOP Pengelolaan Cagar Budaya	Penerapan SOP pengelolaan cagar budaya dan melakukan sosialisasi	Bidang Kebudayaan	Desember 2025

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN DAN KOMUNIKASI ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tapin
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Meningkatnya PAD Usaha pariwisata
 Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Kualitas Pariwisata Daerah
 : Meningkatnya Pelestarian Budaya
 Urusan Pemerintahan : Kebudayaan dan Pariwisata

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Komunikasi			Pemantauan				
		Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penerima Informasi	Pelaksanaan Komunikasi	Bentuk Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Pengadaan sarana dan prasarana destinasi wisata sesuai kebutuhan	Monitoring dan Evaluasi	Masyarakat	Januari 2025	Turun ke lapangan	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekokraf	1 Januari - 30 Desember 2025	1 Januari - 30 Desember 2025	Akan dilakukan rakoov dan monev
2	Pengelolaan Destinasi Wisata sesuai Sapta Pesona	Monitoring dan Evaluasi	Pokdarwis	Januari 2025	Turun ke lapangan	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekokraf	1 Januari - 30 Desember 2025	1 Januari - 30 Desember 2025	Akan dilakukan monitoring dan dilaporkan
3	Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif dan ditindaklanjuti	Monitoring dan Evaluasi	Pelaku ekonomi kreatif	Januari 2025	Turun ke lapangan	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekokraf	1 Januari - 30 Desember 2025	1 Januari - 30 Desember 2025	Akan dilakukan monitoring dan dilaporkan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Tapin								
Tahun Penilaian		: 2025								
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kualitas Pariwisata Daerah								
		: Meningkatnya Pelestarian Budaya								
Sasaran strategis OPD		: Meningkatnya Pelestarian Budaya								
Urusan Pemerintahan		: Kebudayaan dan Pariwisata								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tidak semua destinasi wisata bisa terfasilitasi sarana dan prasarananya dan pengelolaannya	ROO.Disbudpar.01	-	SDM kurang memadai, tidak cukup anggaran dan waktu.	Fasilitasi sarana dan prasarana destinasi wisata yang masih kurang	-	Pengadaan sarana dan prasarana destinasi wisata sesuai kebutuhan	Triwulan I s/d IIV	Triwulan I s/d IIV	Akan dilakukan rapat koordinasi, sosialisasi dan pembinaan
2	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi kreatif	ROO.Disbudpar.03	-	Kurangnya sosialisasi dan Pelaku ekonomi kreatif yang kurang aktif	Pelaku ekonomi kreatif yang tidak variatif dalam mengolah produknya	-	Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif dan ditindaklanjuti	Triwulan I s/d IIV	Triwulan I s/d IIV	Akan dilakukan monitoring dan dilaporkan

Keterangan

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan